

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2018.

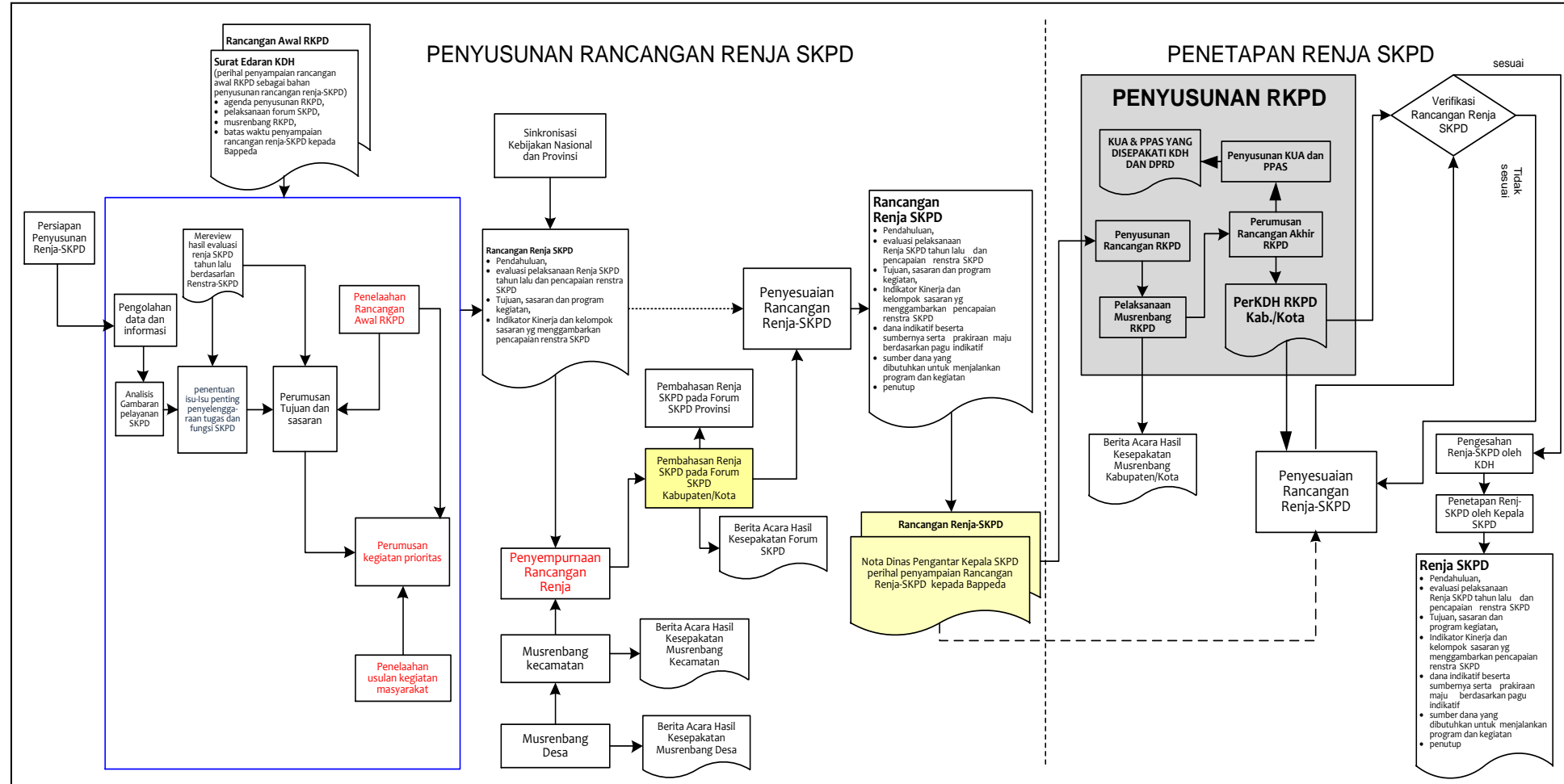
Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
2. Program dalam Renja Perangkat Daerah harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar berikut:

Gambar 1.
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sejalan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Kubu Raya yaitu **Penguatan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah untuk Peningkatkan Kesejahteraan Rakyat** dan Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya **”Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Profesional, Transparan Dan Akuntabel”**, strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Pemerintahan di Tahun 2018 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya yakni meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian dan peningkatan nilai SAKIP.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya menyusun Rencana Kerja Tahun 2018. Renja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kubu Raya dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sistem Rencana Pembangunan Daerah; dan
 9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah ini yaitu:

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.
3. Menetapkan komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dijadikan tolok ukur kinerja sehingga terdapat kepastian dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini yaitu:

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA dan DPA Tahun 2018.
2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018.
3. Memberikan alternatif pemecahan permasalahan.
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka

anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan anggaran untuk peningkatan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018, meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.2 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan kajian/ *review* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 dan perkiraan capaian Tahun 2017, kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan realisasi program dan pelaksanaan Renja BPKAD tahun-tahun sebelumnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 6 (enam) Program dan 64 (enam puluh empat) kegiatan pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 8 (delapan) Program dan 78 (tujuh puluh delapan) kegiatan. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2017
Kabupaten Kubu Raya

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2014-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
I															
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang															
4	04	01	01	01		Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	300	60%
4	04	01	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman surat	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	3	100%
4	04	01	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air & Listrik	Tersedianya air dan listrik di ruko penyimpanan dokumen	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00%		2	100%

4	04	01	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor roda empat dan roda dua	77 unit		15 unit	15 unit	100,00%	17 unit	32	42%
4	04	01	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya penyediaan petugas pekerja dan kelengkapan administrasi keuangan	4	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	3	75%
4	04	01	01	01	08	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Tersedianya petugas, peralatan dan bahan pembersih	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	3	60%
4	04	01	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Kebutuhan alat Tulis Kantor	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	3	60%
4	04	01	01	01	11	Penyediaan Barang cetakan Dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	3	60%
4	04	01	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik /penerangan bangunan kantor	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	3	60%
4	04	01	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Penyediaan bahan informasi/ koran	14.529 Eksemplar	2.850 Eksemplar	2880 Eksemplar	2880 Eksemplar	100,00%	2.890 Eksemplar	8620	59%
4	04	01	01	01	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Penyediaan makanan dan minum rapat	6.991 Kotak	1.200 Kotak	1680 Kotak	1680 Kotak	100,00%	1.680 Kotak	4560	65%

4	04	01	01	01	18	Rapat koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	koordinasi & Konsultasi ke ibu kota negara dan daerah lain	87	Kali	15	Kali	9	Kali	9	Kali	100,00%	15	Kali	39	45%
4	04	01	01	01	19	Rapat koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	koordinasi & Konsultasi dalam kabupaten/kecamatan	60	Kali	10	Kali	10	Kali	10	Kali	100,00%	10	Kali	30	50%
4	04	01	01	01	23	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan SOP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22	Buku	11	Buku						11	Buku	22	100%
4	04	01	01	01	24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	keamanan sarana dan prasarana kantor	1	Tahun	1	Tahun								1	100%
4	04	01	01	01	25	Penataan Arsip/Dokumen Pengelolaan Keuangan	Penataan arsip/dokumen pengelolaan keuangan SKPD	5	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	100,00%	1	Tahun	3	60%
4	04	01	01	02		PROGRAM peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00%	100	%	300	60%
4	04	01	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	kendaraan dinas/operasional	11	unit	3	unit	2	unit	2	unit	100,00%	6	unit	11	100%
4	04	01	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	29	unit	6	unit	16	unit	16	unit	100,00%	1	unit	23	79%
4	04	01	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	peralatan Gedung Kantor	87	Unit	23	Unit	13	Unit	13	Unit	100,00%	18	Unit	54	62%
4	04	01	01	02	10	Pengadaan Meubeleurnya	Tersedianya Meubeleurnya	65	Unit	19	Unit	21	Unit	21	Unit	100,00%	17	Unit	57	88%

4	04	01	01	02	12	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Tersedianya Bangunan dan ruangan Gedung Arsip	10 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00%	1 Unit	6	60%
4	04	01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan gudang dokumen	8 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00%	1 Unit	6	75%
4	04	01	01	02	24	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional	Pemeliharaan Berkala Kendaraan Dinas Operasional Roda 4(empat)	6 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	3	50%
4	04	01	01	02	26	Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	5 Thn	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	3	60%
4	04	01	01	02	28	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan berkala peralatan Gedung kantor (mesin foto kopi)	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	3	60%
4	04	01	01	02	30	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Komputer	Berfungsinya peralatan komputer dengan baik	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	3	60%
4	04	01	01	23	04	Pemeliharaan Website	Berfungsinya Website BPKAD Kab. Kubu Raya	1 Website						-	0%
4	04	01	01	03		PROGRAM Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100 %	-	-		100 %	200	67%
4	04	01	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas	Tersedianya Pakaian Dinas	200 Stel	53 Stel				78 Stel	131	66%

4	04	01	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	300	60%
4	04	01	01	06	01	Penyusunan Lapopran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPKAD	40 Buku	8 Buku	8 Buku	8 Buku	100,00%	8 Buku	24	60%
4	04	01	01	06	02	Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran Tiap tahun	25 Buku	5 Buku	5 Buku	5 Buku	100,00%	5 Buku	15	60%
4	04	01	01	06	04	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	laporan Keuangan akhir tahun SKPD	50 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku	100,00%	10 Buku	30	60%
4	04	01	01	06	12	Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah / LPPD	Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	32 Buku	8 Buku	8 Buku	8 Buku	100,00%	8 Buku	24	75%
4	04	01	01	06	08	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Dokumen RKA, DPA, dan DPPA	12 Buku					4 Dokumen	4	33%
4	04	01	01	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	500 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	300	60%

4	04	01	01	17	06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Perda APBD	1.640	Buku	320	Buku	320	Buku	320	Buku	100,00%	360	Buku	1000	61%
4	04	01	01	17	07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Pebup APBD	750	Buku	140	Buku	140	Buku	140	Buku	100,00%	190	Buku	470	63%
4	04	01	01	17	08	Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Perda perubahan APBD	1.574	Buku	300	Buku	300	Buku	300	Buku	100,00%	300	Buku	900	57%
4	04	01	01	17	09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	PERBUP perubahan APBD	1.920	Buku	360	Buku	360	Buku	360	Buku	100,00%	360	Buku	1080	56%
4	04	01	01	17	68	Asistensi Penyusunan RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD	Peningkatan pemahaman SKPD dalam Penyusunan SKPD dalam penyusunan DPA, DPPA, SPD dan Anggaran Kas	190	SKPD	41	SKPD	41	SKPD	41	SKPD	100,00%	36	SKPD	118	62%
4	04	01	01	17	67	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Peserta Bimtek Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual	28	Org	16	Org	8	Org	8	Org	100,00%	4	Org	28	100%

4	04	01	01	17	73	Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	Persentasepeningkatan pengetahuan Administrasi Keuangan desa	200	100 %	100 %	100 %	100,00%		200	100%
4	04	01	01	17	53	Penatausahaan Keuangan Satuan kerja Pengelolaan keuangan Daerah (SKPKD)	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPKD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	36	60%
4	04	01	01	17	145	Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Anggaran	Pertemuan Perencanaan penganggaran SKPD Kubu Raya	82 SKPD	41 SKPD	41 SKPD	41 SKPD	100,00%		82	100%
4	04	01	01	17	144	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Anggaran SKPD	Bertambahnya pemahaman aparatur akan pengelolaan keuangan SKPD	149 SKPD		41 SKPD	41 SKPD	100,00%	36 SKPD	77	52%
4	04	01	01	17	118	Manajemen aplikasi SIMDA	Pelaksanaan Penataan Dokumen SKPD dalam SIMDA	4 Sistem		1 Sistem	1 Sistem	100,00%	1 Sistem	2	50%
4	04	01	01	17	79	Penyusunan Data Dasar, Rekonsiliasi Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil)	Terlaksananya Rekonsiliasi Data dan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil)	4 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	2	50%
4	04	01	01	17	24	Penatausahaan Keuangan daerah	Penerbitan surat Perintah Penyediaan Dana Pemerintah Kubu Raya	46.130 SP2D	9.226 SP2D	9226 SP2D	9226 SP2D	100,00%	9.226 SP2D	27678	60%

4	04	01	01	17	137	Rekonsiliasi Penggajian	Terlaksanya Rekonsiliasi Data Gaji KKR dengan Kemenkeu/Bapetaram/PT. Taspen dan BPJS	15 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100,00%	6 Kali	10	67%
4	04	01	01	17	23	Penataan Administrasi Penggajian	Pengelolaan Administrasi Penggajian Pegawai Pemerintah Kab. Kubu Raya	70 Bln Daftar Gaji	14 Bln Daftar Gaji	14 Bln Daftar Gaji	14 Bln Daftar Gaji	100,00%	14 Bln Daftar Gaji	42	60%
4	04	01	01	17	14	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pemahaman aparaturnya terhadap aturan Pengelolaan Keuangan Daerah	16 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100,00%	4 Kali	12	75%
4	04	01	01	17	04	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan keuangan Daerah	Peraturan tentang Perbup dan Juknis Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Juknis	20 Juknis	20 Juknis	20 Juknis	100,00%	20 Juknis	60	60%
4	04	01	01	17	139	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya evaluasi keuangan atas belanja langsung dan tidak langsung serta pendapatan daerah	10 Kali	5 Kali				5 Kali	10	100%
4	04	01	01	17	10	penyusunan Rancangan Perda TT. Pertanggung Jawaban	PERDA TT. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	844 Buku	140 Buku	140 Buku	140 Buku	100,00%	284 Buku	564	67%

4	04	01	01	17	28	Penyusunan Laporan Keuangan (LRA, LAK, LO, LPE, LP-SAL, NERACA, CaLK)	Laporan Keuangan Daerah (LRA, LAK, LO, LPE, LP-SAL, Neraca, CaLK)	102 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	100,00%	22 Buku	62	61%
4	04	01	01	17	141	Penyusunan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Semesteran	Pelaporan keuangan semesteran	240 Buku	48 Buku	48 Buku	48 Buku	100,00%	48 Buku	144	60%
4	04	01	01	17	29	Pembinaan Akuntansi SKPD Berbasis Akrua	Peningkatan pemahaman SKPD dalam akuntansi berbasis akrual (PP.71)	118 SKPD	41 SKPD	41 SKPD	41 SKPD	100,00%	36 OPD	118	100%
4	04	01	01	17	145	Konsolidasi dan Konsultasi Penganggaran	Terlaksananya penganggaranSKPD se Kab. Kubu Raya	1 Kegiatan					1 Kegiatan	1	100%
4	04	01	01	17	147	Pengelolaan Surat penyediaan dana (SPD)	Pengelolaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	24 Bulan						0	0%
4	04	01	01	17	146	Manajemen Pinjaman Daerah	Pengelolaan Pinjaman Daerah	2 Tahun					1 Tahun	1	50%
4	04	01	01	17	87	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Jumlah stiker Barang Milik Daerah BPKAD	1.500 Lembar					1.500 Lembar	1500	100%
4	04	01	01	17	91	Penyusunan Standarisasi Biaya	Standardisasi biaya pemeliharaan barang daerah	350 Buku	70 Buku	70 Buku	70 Buku	100,00%	70 Buku	210	60%

4	04	01	01	17	50	penilaian Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kab. Kubu Raya	Data nilai aset yang sudah di nilai	183	Buku	30	Buku	30	Buku	30	Buku	100,00%	63	Buku	123	67%
4	04	01	01	17	51	Penyusunan daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah	Data kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	390	Buku	80	Buku	80	Buku	80	Buku	100,00%	70	Buku	230	59%
4	04	01	01	17	74	Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah kab. Kubu Raya	Tersedianya data nilai aset yang dihapuskan	200	Buku	40	Buku	40	Buku	40	Buku	100,00%	40	Buku	120	60%
4	04	01	01	17	92	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya identitas Aset Milik Pemerintah Daerah	195	Unit	50	Unit	50	Unit	50	Unit	100,00%	40	Unit	140	72%
4	04	01	01	17	148	Manajemen Aplikasi pemetaan Aset daerah	Terlaksananya pemetaan aset daerah berbasis geogle map	2	Aplikasi										-	0%
4	04	01	01	17	140	Penyelesaian Kerugian Daerah	Terlaksananya Penyelesaian TGR Keuangan dan Barang Milik Daerah	33	OPD								11	OPD	11	33%
4	04	01	01	17	02	Penyusunan standar satuan Harga	Standar Satuan Harga Kabupaten Kubu Raya	470	Buku	90	Buku	90	Buku	90	Buku	100,00%	100	Buku	280	60%
4	04	01	01	17	120	Analisis Standar Belanja	Tersedianya Analisis Standar Belanja dalam kegiatan	1	Dokumen			1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%			1	100%

4	04	01	01	33		Program Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan ketatalaksanaan dan aparatur daerah	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan aparatur Pemerintah Daerah	100	%						100	%	100	33%
4	04	01	01	33	29	peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik	3	Tahun						1	Tahun	1	33%
4	04	01	01	33	26	Penyusunan Data Base E Formasi	Penyusunan database kebutuhan pegawai, menentukan kelas jabatan dan menentukan sasaran kerja pegawai	18	Buku						6	Buku	6	33%
4	04	01	01	33	27	penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	12	Buku						6	Buku	6	50%
4	04	01	01	33	32	Penyusunan Survei kepuasan Masyarakat	Terlaksanya penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	12	Buku								-	0%
4	04	01	01	33	33	Penyusunan Standar Pelayanan	Terlaksananya standar pelayanan BPKAD	8	Buku						4	Buku	4	50%
4	04	01	01	33	36	Penyusunan Sistem Pengendalian Internal	Terlaksananya Penyusunan SPIP	6	Buku									0%

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- a. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah Realisasi capaian Renstra 2014-2019 untuk program/kegiatan yang sampai dengan tahun 2017 belum mencapai 60%.

Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan yaitu:

- Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Daerah yaitu 33%;
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu 50%; dan
- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi yaitu 50%.

Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan yaitu:

- Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional yaitu 42%;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yaitu 59%;
- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yaitu 45%;
- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yaitu 50%;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yaitu 50%;
- Pemeliharaan Website yaitu 0%;
- Pengelolaan Dokumen Kepegawaian yaitu 33%;
- Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA yaitu 33%;
- Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yaitu 57%;

- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD yaitu 56%;
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Anggaran SKPD yaitu 52%;
- Manajemen Aplikasi SIMDA yaitu 50%;
- Penyusunan Data Dasar, Rekonsiliasi Data Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil) yaitu 50%;
- Pembinaan Penyusunan Laporan fungsional Bendahara SKPD yaitu 52%;
- Pengelolaan Surat Penyediaan Dana (SPD) yaitu 0%;
- Sensus Barang Milik Daerah yaitu 0%;
- Manajemen Pinjaman Daerah yaitu 50%;
- Inventarisasi Barang Daerah yaitu 56%;
- Manajemen Aplikasi Pemetaan Aset Daerah yaitu 0%;
- Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang daerah yaitu 59%;
- Penyelesaian Kerugian Daerah yaitu 33%;
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yaitu 33%;
- Penyusunan Data Base E Formasi yaitu 33%;
- Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan yaitu 50 %;
- Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yaitu 0%;
- Penyusunan Standar Pelayanan yaitu 50%;
- Penyusunan Standar Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) SKPD yaitu 0%;
- Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi SKPD yaitu 33%; dan
- Pembuatan Website yaitu 50%

b. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yaitu:

Realisasi

Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah Realisasi capaian Renstra 2014-2019 untuk program/kegiatan yang sampai dengan tahun 2017 sebesar 60%.

Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan yaitu:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu 60%;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu 60%;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu 60%;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yaitu 60%; dan
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu 60%.

Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan yaitu:

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yaitu 60%;
- Penyediaan alat Tulis Kantor yaitu 60%;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu 60%;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yaitu 60%;
- Penataan Arsip/ Dokumen Pengelolaan Keuangan yaitu 60%;
- Penyediaan Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat yaitu 60%;
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor yaitu 60%;
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan komputer yaitu 60%;
- Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yaitu 60%;
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran yaitu 60%;
- Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun yaitu 60%;
- Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu 60%;

- Penatausahaan Keuangan Daerah yaitu 60%;
 - Penataan Administrasi Penggajian yaitu 60%;
 - Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu 60%;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yaitu 60%;
 - Manajemen Sistem Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual yaitu 60%;
 - Penyusunan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Semesteran yaitu 60%;
 - Penyusunan Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Daerah yaitu 60%;
 - Rekonsiliasi Laporan Keuangan, Aset dan Barang Persediaan yaitu 60%;
 - Manajemen Penatausahaan Barang Daerah yaitu 60%;
 - Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu 60%; dan
 - Penyusunan Standar Satuan Harga yaitu 60%.
- c. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yaitu:
- Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah Realisasi capaian Renstra 2014-2019 untuk program/kegiatan yang sampai dengan tahun 2017 melebihi 60%.
- Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang melebihi target kinerja hasil yang direncanakan yaitu Program Peningkatan Disiplin Aparatur yaitu 100%.
- Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan yaitu:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat yaitu 100%;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yaitu 100%;
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan yaitu 75%;
 - Penyediaan Makanan dan Minuman yaitu 66%;

- Penyusunan Standar Operasional Prosedur yaitu 100%;
- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor yaitu 100%;
- Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional yaitu 100%;
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yaitu 79%;
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yaitu 62%;
- Pengadaan Mebeleur yaitu 88%;
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor yaitu 75%;
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya yaitu 66%;
- Pengadaan Pakaian Olahraga yaitu 100%;
- Bimtek Implementasi Peraturan Perundangan yaitu 61%;
- Penyusunan Evaluasi Jabatan yaitu 75%;
- Pembelajaran di Kantor Sendiri (*inhouse training*) yaitu 100%;
- Penyusunan Analisa Jabatan yaitu 100%;
- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/LPPD yaitu 75%
- Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD yaitu 61%;
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yaitu 63%;
- Asistensi Penyusunan RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD yaitu 62%;
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD yaitu 100%;
- Pembinaan Administrasi Keuangan Desa yaitu 100%;
- Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Anggaran yaitu 100%;
- Rekonsiliasi Penggajian yaitu 67%;
- Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu 75%;
- Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu 100%;
- Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yaitu 67%;

- Bimtek tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bagi Pengelola Keuangan yaitu 100%;
 - Penyusunan Laporan Keuangan yaitu 61%;
 - Pembinaan Akuntansi SKPD Berbasis akrual yaitu 100%;
 - Konsolidasi dan Konsultasi Penganggaran yaitu 100%;
 - Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD yaitu 100%;
 - Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset Daerah yaitu 67%;
 - SOP Penghapusan dan Pemusnahan Barang Inventaris Barang Inventaris Milik Daerah yaitu 100%;
 - Penilaian Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kab. Kubu Raya yaitu 67%;
 - Pengamanan Barang Milik daerah yaitu 72%;
 - Analisis Standar Belanja yaitu 100%
 - Sistem Informasi Perencanaan SKPD yaitu 100%;
 - Penyusunan Renstra SKPD yaitu 67%; dan
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan yaitu:
- Komitmen yang kuat dari pimpinan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 - Ketersediaan alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 - Ketersediaan sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 - Ketersediaan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah baik secara kualitas maupun kuantitas;
 - Ketersediaan sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Hubungan kerja dengan instansi terkait dan *stakeholder*; dan
- Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset daerah

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan kinerja program/ kegiatan sangat berpengaruh terhadap capaian program Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Realisasi pelaksanaan kinerja program/ kegiatan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Renstra 2014-2019. Terpenuhi atau tidak tercapainya target capaian program/ kegiatan menunjukkan keberhasilan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan merupakan dasar untuk menentukan kebijakan organisasi.

f. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/ kegiatan yaitu:

- Menyediakan/ mengalokasikan anggaran dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Menyediakan sarana kerja yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui mengikutsertakan personil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada pelatihan baik formal maupun informal khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- Mengikuti dan menaati regulasi/ perubahan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Pada tahun 2017, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki 8 (delapan) indikator kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Secara umum, pelaksanaan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terealisasi sesuai yang ditargetkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014-2019.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kubu Raya

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	I K K	Target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ketepatan Waktu Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	-	-	-	-	Paling lambat akhir Desember (31 Desember) tahun anggaran sebelumnya	Paling lambat akhir Desember (31 Desember) tahun anggaran sebelumnya	-	-	Paling lambat akhir Desember (31 Desember) tahun anggaran sebelumnya	Paling lambat akhir Desember (31 Desember) tahun anggaran sebelumnya	
2	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)					Paling lambat 3 bln setelah tahun anggaran berakhir	Paling lambat 3 bln setelah tahun anggaran berakhir					

3	Persentase kesesuaian penyajian laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)					100%	100%					
4	Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	-	-	Paling Lambat 6 bln setelah tahun anggaran berakhir	Paling Lambat 6 bln setelah tahun anggaran berakhir	-	-	Paling Lambat 6 bln setelah tahun anggaran berakhir	Paling Lambat 6 bln setelah tahun anggaran berakhir	
5	Persentase Laporan Penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial yang disampaikan sesuai aturan	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
6	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar akuntansi Pemerintahan (SAP)	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
7	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pengelolaan Aset sesuai Standar	-	-	-	-	65%	70%	-	-	65%	70%	
8	Persentase Pencatatan Aset Tetap	-	-	-	-	60%	65%	-	-	60%	65%	

9	Nilai SAKIP	-	-	-	-	A	A	-	-	A	A	
10	Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran tepat waktu				95%				100%			
11	Jumlah SKPD dengan penyerapan keuangan sesuai target				90%				92%			
12	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu				100%				93%			
13	Opini BPK terhadap laporan keuangan (WTP)				WTP				WTP			
14	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu				100%				100%			
15	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban				6 bulan setelah tahun anggaran berakhir				6 bulan setelah tahun anggaran berakhir			

	Pelaksanaan APBD tepat waktu											
16	Persentase DPA SKPD yang sesuai dengan RKBU				90%				78%			
17	Persentase Pencatatan Aset tetap				75%				106,78%			
18	Tersedianya Rancangan peraturan daerah tentang APBD	-	-	1 Perda APBD TA 2017	-	-	-	1 Perda APBD TA 2017	-	-	-	
19	Tersedianya Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	-	-	1 Perbup Penjabaran APBD TA 2017	-	-	-	1 Perbup Penjabaran APBD TA 2017	-	-	-	
20	Tersedianya rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	-	-	1 Perda Perubahan APBD TA 2016	-	-	-	1 Perda Perubahan APBD TA 2016	-	-	-	

21	Tersediannya Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	-	-	1 Perbup Penjabaran perubahan APBD TA 2016	-	-	-	1 Perbup Penjabaran perubahan APBD TA 2016	-	-	-	
22	Tersediannya DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD	-	-	38 SKPD	-	-	-	38 SKPD	-	-	-	
23	Penerimaan dana Perimbangan (DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil)	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	
24	Jumlah Penerbitan pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	-	-	9226 SP2D	-	-	-	5602 SP2D	-	-	-	
25	Tersediannya daftar gaji PNS Kabupaten Kubu Raya	-	-	4264 Daftar Gaji/Kartu Gaji	-	-	-	5.807 Daftar Gaji/Kartu Gaji	-	-	-	
26	Tersediannya Regulasi Ketentuan Peraturan Pengelolaan Keuangan daerah	-	-	20 Juknis	-	-	-	20 Juknis	-	-	-	

27	Tersedianya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	1 Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015	-	-	-	1 Perda Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD TA 2015	-	-	-	
28	Tersedianya Perbup Penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	1 Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015	-	-	-	1 Perbup Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD TA 2015	-	-	-	
29	Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Fungsional Bendahara tepat waktu	-	-	100%	-	-	-	99.97%	-	-	-	
30	Tersedianya Laporan Keuangan Kabupaten Kubu Raya	-	-	1 laporan Keuangan KKR	-	-	-	1 laporan Keuangan KKR	-	-	-	
31	Tersedianya Standar pengadaan dan pemeliharaan Aset daerah	-	-	2 Regulasi	-	-	-	2 Regulasi	-	-	-	

32	Terinventarisirnya Aset Daerah dalam SIMBADA	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	
33	Jumlah Aset daerah yang dihapus tiap tahun	-	-	38 SKPD	-	-	-	15 SKPD	-	-	-	
34	Persentase bertambahnya aset daerah tiap tahun	-	-	2%	-	-	-	6.55%	-	-	-	
35	Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja BPKAD	-	-	4 laporan	-	-	-	4 Laporan	-	-	-	

Berdasarkan tabel tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki indikator kinerja yang berbeda untuk tahun 2015 dan 2016,2017, serta 2018 dan 2019. Perubahan Indikator Kinerja tersebut dilakukan karena perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 1 Perda APBD Tahun anggaran 2017;
2. Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 1 Perbup Penjabaran APBD Tahun anggaran 2017;
3. Tersedianya Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 1 Perda Perubahan APBD Tahun anggaran 2017;
4. Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 1 Perbup Penjabaran APBD Tahun anggaran 2017;
5. Tersedianya DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 38 SKPD;
6. Penerimaan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil). Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 100%;

7. Jumlah Penerbitan Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Indikator kinerja ini terealisasi 5.602 SP2D dari yang ditargetkan 9.226 SP2D;
8. Tersedianya Daftar Gaji PNS Kabupaten Kubu Raya. Indikator kinerja ini terealisasi 5.807 Daftar Gaji/ Kartu Gaji dari yang ditargetkan 4.264 Daftar Gaji/ Kartu Gaji;
9. Tersedianya Regulasi Ketentuan Peraturan Pengelolaan Keuangan daerah. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 20 Petunjuk Teknis ;
10. Tersedianya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 1 Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
11. Tersedianya Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 1 Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
12. Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Fungsional Bendahara tepat waktu. Indikator Kinerja kegiatan ini terealisasi 99,97% dari yang ditargetkan 100%;
13. Tersedianya Laporan Keuangan Kabupaten Kubu Raya. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 1 Laporan Keuangan Kabupaten Kubu Raya;
14. Tersedianya Standar Pengadaan dan Pemeliharaan Aset daerah. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 2 regulasi;
15. Terinventarisirnya Aset Daerah dalam SIMBADA. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 100%;
16. Jumlah Aset Daerah yang dihapus tiap tahun Indikator kinerja ini terealisasi 15 SKPD dari 38 SKPd yang ditargetkan;
17. Persentase bertambahnya aset daerah tiap tahun. Indikator kinerja ini terealisasi 6,55% dari 2% yang ditargetkan;

18. Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja BPKAD. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 4 Laporan.

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja “Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran tepat waktu” ditargetkan 95% dan terealisasi 100%. Tolok ukur indikator kinerja ini yaitu dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kubu Raya yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah, 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan kegiatan tepat waktu;
2. Indikator kinerja “Jumlah SKPD dengan penyerapan keuangan sesuai target” ditargetkan 90% dan terealisasi 92%. Tolok ukur indikator kinerja ini yaitu jumlah Perangkat Daerah yang realisasi penyerapan anggarannya minimal 80% dari target anggaran yang ditetapkan terhadap seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kubu Raya. Pada tahun 2017, jumlah Perangkat Daerah yang realisasi penyerapan anggarannya minimal 80% dari target anggaran yang ditetapkan yaitu 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah dari seluruh perangkat daerah yang berjumlah 36 (tiga puluh enam);
3. Indikator kinerja “Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu” ditargetkan 100% dan terealisasi 93%. Capaian indikator kinerja ini diukur dari jumlah penerbitan SP2D tepat waktu terhadap keseluruhan jumlah SP2D yang diterbitkan. Tahun 2017, jumlah penerbitan SP2D tepat waktu sebanyak 10.212 dan jumlah keseluruhan SP2D yang diterbitkan 10.980;
4. Indikator Kinerja ”Opini BPK terhadap pelaporan keuangan (WTP)” terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yaitu opini BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

5. Indikator Kinerja “Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu” ditargetkan 100% dan terealisasi 100%. Pengukuran capaian indikator kinerja ini diperoleh dari jumlah perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu terhadap jumlah seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kubu Raya. Pada tahun 2017, jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sebanyak 36 (tiga puluh enam) dari seluruh Perangkat daerah yang berjumlah 36 (tiga puluh enam).
6. Indikator Kinerja “Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu”. Pada tahun 2017, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu yaitu 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal ini berarti target yang direncanakan dapat direalisasikan.
7. Indikator kinerja “Persentase DPA SKPD yang sesuai dengan RKBU” ditargetkan 90% dan terealisasi 78%. Tolok ukur pencapaian indikator kinerja ini yaitu jumlah DPA-SKPD yang sesuai dengan RKBU. Pada tahun 2017, jumlah DPA-SKPD yang sesuai dengan RKBU sebanyak 28 (dua puluh delapan) dari seluruh jumlah DPA-SKPD sebanyak 36 (tiga puluh enam).
8. Indikator Kinerja “Persentase pencatatan aset tetap” ditargetkan 75% dan terealisasi 106,78%. Pada tahun 2017, jumlah nilai aset yang sudah tercatat Rp262.524.976.805,28 dari jumlah nilai aset tetap yang seharusnya tercatat Rp245.854.925.080,00.

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi BPKAD dan Catatan Strategis

Isu penting penyelenggaraan fungsi dan tugas BPKAD saat ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan hingga pelaporan.

Hal-hal krusial yang berhubungan dengan proses perencanaan diantaranya analisis dan proyeksi program kegiatan dan keuangan yang tepat, sesuai dengan aturan/standar serta kemampuan daerah. Akurasi proses perencanaan akan berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien. Salah satu isu penting di BPKAD pada tahun anggaran 2018 yang harus mendapat perhatian adalah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Oleh karena itu, program dan kegiatan harus diawali dengan proses perencanaan yang optimal terutama dalam penetapan target indikator kinerja utama agar sesuai dengan perkembangan dan dinamika di lapangan.

Penatausahaan sebagai proses pengelolaan administrasi keuangan dari realisasi pelaksanaan kegiatan dari waktu ke waktu senantiasa akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Pada tahun anggaran 2018, proses penatausahaan administrasi keuangan di BPKAD baik dalam kapasitasnya sebagai Perangkat Daerah maupun SKPKD ditandai dengan pemanfaatan perangkat lunak (*software*) untuk mendukung proses kerja. Berjalannya fungsi penatausahaan dengan baik diharapkan akan menghasilkan pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang *reliable* dan minim dari berbagai catatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disusun dalam format laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BPKAD mempunyai peranan strategis dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Isu penting lainnya berkaitan dengan laporan keuangan Kabupaten Kubu Raya adalah penyelesaian berbagai catatan BPK dan upaya-upaya yang

harus dilaksanakan dalam rangka penerapan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual.

Pengelolaan aset daerah (manajemen aset) juga menjadi fokus program dan kegiatan di tahun 2018. Pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan penghapusan aset akan terus diperbaiki dengan dukungan peraturan dan aplikasi *software* manajemen aset terkini.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga menjalankan fungsi perbendaharaan daerah, verifikasi, pembukuan dan pelaporan pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya. Fungsi perbendaharaan berkaitan dengan penyediaan instrument-instrumen pembayaran terhadap semua program dan kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Kubu Raya. Sinkronisasi persepsi mekanisme perbendaharaan diantara pelaksana masih menjadi tantangan tersendiri bagi BPKAD di masa datang.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD diantaranya :

- a. Sumber Daya Manusia pengelola keuangan dan aset secara kualitas dan kuantitas belum memadai;
- b. Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia pada organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Sarana dan prasarana pendukung belum memadai;
- d. Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan; dan
- e. Masih lemahnya koordinasi dan komitmen organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kubu Raya dalam membenahi permasalahan aset yang berada dalam penguasaannya.

Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

- a. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dalam rangka mewujudkan *good governance*;
- b. Meningkatnya intensitas pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi perangkat daerah termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Kesamaan pandangan dan pemahaman aparatur pengelola keuangan dan aset daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Adanya dukungan baik dari pimpinan eksekutif dan legislatif

Rekomendasi dan Catatan Strategis

- a. Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia dengan memberikan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, dan kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Sumber Daya Manusia khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Secara kuantitas, Sumber Daya Manusia dapat ditingkatkan melalui penerimaan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Peningkatan Kompetensi SDM melalui pendidikan di bidang penilaian aset dan melakukan koordinasi serta pendampingan pada perangkat daerah dalam membuat neraca untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan;
- c. Menyediakan sarana prasarana dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Meningkatkan koordinasi dan membangun komitmen aparatur dengan organisasi perangkat daerah dalam rangka perbaikan pengelolaan aset daerah.

- e. Mengupayakan penerapan “*reward and punishment*” secara proporsional; dan
- f. Menjaga hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait dan *stakeholder*.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun.

Perbandingan antara rancangan awal usulan RKPD tahun 2018 dengan hasil analisa kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Kubu Raya

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	BPKAD	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Perkantoran	100%	499.058.000	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	BPKAD	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Perkantoran	100%	499.058.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	BPKAD	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor roda empat dan roda dua	22 Unit	3.825.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	BPKAD	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor roda empat dan roda dua	22 Unit	3.825.000	
	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	BPKAD	Tersedianya petugas, peralatan dan bahan pembersih	1 Tahun	27.400.000	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	BPKAD	Tersedianya petugas, peralatan dan bahan pembersih	1 Tahun	27.400.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPKAD	Penyediaan Kebutuhan alat Tulis Kantor	1 Tahun	59.790.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPKAD	Penyediaan Kebutuhan alat Tulis Kantor	1 Tahun	59.790.000	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	32.230.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	32.230.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Tersedianya komponen listrik /penerangan bangunan kantor	1 Tahun	5.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Tersedianya komponen listrik /penerangan bangunan kantor	1 Tahun	5.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	BPKAD	Penyediaan bahan informasi/ koran	2720 Eksemplar	7.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	BPKAD	Penyediaan bahan informasi/ koran	2720 Eksemplar	7.700.000	
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	BPKAD	Penyediaan makanan dan minum rapat	1200 Kotak	39.000.000	Penyediaan Makanan Dan Minuman	BPKAD	Penyediaan makanan dan minum rapat	1200 Kotak	39.000.000	
	Rapat koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	BPKAD	koordinasi & Konsultasi ke ibu kota negara dan daerah lain	17 kali	141.400.000	Rapat koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	BPKAD	koordinasi & Konsultasi ke ibu kota negara dan daerah lain	17 kali	141.400.000	
	Rapat koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	BPKAD	koordinasi & Konsultasi dalam kabupaten/kecamatan	10 kali	8.933.000	Rapat koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	BPKAD	koordinasi & Konsultasi dalam kabupaten/kecamatan	10 kali	8.933.000	
	Penataan Arsip/Dokumen Pengelolaan Keuangan	BPKAD	Penataan arsip/ dokumen pengelolaan keuangan SKPD	1 Tahun	173.280.000	Penataan Arsip/Dokumen Pengelolaan Keuangan	BPKAD	Penataan arsip/ dokumen pengelolaan keuangan SKPD	1 Tahun	173.280.000	
2	PROGRAM peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	BPKAD	Persentase Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur	100%	222.188.000	PROGRAM peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	BPKAD	Persentase Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur	100%	222.188.000	

	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	4.550.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	4.550.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BPKAD	peralatan Gedung Kantor	23 unit	54.338.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BPKAD	peralatan Gedung Kantor	23 unit	54.338.000	
	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	BPKAD	Tersedianya Bangunan dan ruangan Gedung Arsip	1 Unit	80.000.000	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	BPKAD	Tersedianya Bangunan dan ruangan Gedung Arsip	1 Unit	80.000.000	
	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPKAD	Pemeliharaan Berkala Kendaraan Dinas Operasional 4(empat) Roda	1 Unit	50.300.000	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPKAD	Pemeliharaan Berkala Kendaraan Dinas Operasional 4(empat) Roda	1 Unit	50.300.000	
	Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	14.000.000	Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	14.000.000	
	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	BPKAD	Pemeliharaan berkala peralatan Gedung kantor (mesin foto kopi)	1 Tahun	4.000.000	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	BPKAD	Pemeliharaan berkala peralatan Gedung kantor (mesin foto kopi)	1 Tahun	4.000.000	
	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Komputer	BPKAD	Berfungsinya peralatan komputer dengan baik	1 Tahun	15.000.000	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Komputer	BPKAD	Berfungsinya peralatan komputer dengan baik	1 Tahun	15.000.000	
3	PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	BPKAD	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	146.850.000	PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	BPKAD	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	146.850.000	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundangan	BPKAD	Pengiriman peserta Bimtek	7 Orang	75.550.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundangan	BPKAD	Pengiriman peserta Bimtek	7 Orang	75.550.000	
	Penyusunan Evaluasi Jabatan BPKAD	BPKAD	Terlaksananya Evaluasi Jabatan	5 Buku	10.000.000	Penyusunan Evaluasi Jabatan BPKAD	BPKAD	Terlaksananya Evaluasi Jabatan	5 Buku	10.000.000	
	Pengelolaan Dokumen Kepegawaian	BPKAD	Pengelolaan DUK, SKP, Kenaikan Gaji Berkala, Inpassing, Cuti, Usulan Kenaikan Pangkat, daftar hadir, dankartu induk pegawai	69 PNS dan Non PNS	61.300.000	Pengelolaan Dokumen Kepegawaian	BPKAD	Pengelolaan DUK, SKP, Kenaikan Gaji Berkala, Inpassing, Cuti, Usulan Kenaikan Pangkat, daftar hadir, dankartu induk pegawai	69 PNS dan Non PNS	61.300.000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan capaian Kinerja dan Keuangan	BPKAD	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	100%	46.261.500	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan capaian Kinerja dan Keuangan	BPKAD	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	100%	46.261.500	
	Penyusunan Lapopran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/penyusunan Laporan Kinerja Tahunan(LKT)	BPKAD	Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPKAD	8 Buku	10.000.000	Penyusunan Lapopran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/penyusunan Laporan Kinerja Tahunan(LKT)	BPKAD	Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPKAD	8 Buku	10.000.000	
	Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	BPKAD	Laporan Keuangan Semesteran Tiap tahun	5 Buku	7.261.500	Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	BPKAD	Laporan Keuangan Semesteran Tiap tahun	5 Buku	7.261.500	

	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	BPKAD	laporan Keuangan akhir tahun SKPD	10 Buku	9.500.000	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	BPKAD	laporan Keuangan akhir tahun SKPD	10 Buku	9.500.000	
	Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah / LPPD	BPKAD	Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	8 Buku	10.000.000	Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah / LPPD	BPKAD	Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	8 Buku	10.000.000	
	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	BPKAD	Dokumen RKA, DPA, dan DPPA	4 Buku	9.500.000	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	BPKAD	Dokumen RKA, DPA, dan DPPA	4 Buku	9.500.000	
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	BPKAD	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	100%	3.686.768.775	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	BPKAD	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	100%	3.686.768.775	5
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	BPKAD	Perda APBD	320 Buku	534.236.000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	BPKAD	Perda APBD	320 Buku	534.236.000	
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Pebup APBD	140 Buku	199.525.000	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Pebup APBD	140 Buku	199.525.000	
	Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	BPKAD	Perda perubahan APBD	337 Buku	168.922.250	Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	BPKAD	Perda perubahan APBD	337 Buku	168.922.250	
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	PERBUP perubahan APBD	420 Buku	277.494.400	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	PERBUP perubahan APBD	420 Buku	277.494.400	

	Asistensi Penyusunan RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD	BPKAD	Peningkatan pemahaman SKPD dalam Penyusunan SKPD dalam penyusunan DPA, DPPA, SPD dan Anggaran Kas	36 PD	192.678.400	Asistensi Penyusunan RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD	BPKAD	Peningkatan pemahaman SKPD dalam Penyusunan SKPD dalam penyusunan DPA, DPPA, SPD dan Anggaran Kas	36 PD	192.678.400	
	Penatausahaan Keuangan Satuan kerja Pengelolaan keuangan Daerah (SKPKD)	BPKAD	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPKD	12 Dokumen	13.520.600	Penatausahaan Keuangan Satuan kerja Pengelolaan keuangan Daerah (SKPKD)	BPKAD	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPKD	12 Dokumen	13.520.600	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Anggaran SKPD	BPKAD	Bertambahnya pemahaman aparatur akan pengelolaan keuangan SKPD	36 PD	54.238.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan keuangan/Anggaran SKPD	BPKAD	Bertambahnya pemahaman aparatur akan pengelolaan keuangan SKPD	36 PD	54.238.000	
	Manajemen aplikasi SIMDA	BPKAD	Pelaksanaan Penataan Dokumen SKPD dalam SIMDA	1 Dokumen	41.806.000	Manajemen aplikasi SIMDA	BPKAD	Pelaksanaan Penataan Dokumen SKPD dalam SIMDA	1 Dokumen	41.806.000	
	Penyusunan Data Dasar, Rekonsiliasi Data Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil)	BPKAD	Terlaksananya Rekonsiliasi Data dan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil)	1 Tahun	64.178.450	Penyusunan Data Dasar, Rekonsiliasi Data Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil)	BPKAD	Terlaksananya Rekonsiliasi Data dan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil)	1 Tahun	64.178.450	

	Penatausahaan Keuangan daerah	BPKAD	Penerbitan surat Perintah Penyediaan Dana Pemerintah Kab. Kubu Raya	9,226 SP2D	418.647.175	Penatausahaan Keuangan daerah	BPKAD	Penerbitan surat Perintah Penyediaan Dana Pemerintah Kab. Kubu Raya	9,226 SP2D	418.647.175	
	Rekonsiliasi Penggajian	BPKAD	Terlaksana Rekonsiliasi Data Gaji KKR dengan Kemenkeu/Bapetarum/P T. Taspen dan BPJS	2 Kali	64.806.600	Rekonsiliasi Penggajian	BPKAD	Terlaksana Rekonsiliasi Data Gaji KKR dengan Kemenkeu/Bapetarum/P T. Taspen dan BPJS	2 Kali	64.806.600	
	Penataan Administrasi Penggajian	BPKAD	Pengelolaan Administrasi Penggajian Pegawai Pemerintah Kab. Kubu Raya	14 Bln daftar gaji	245.472.800	Penataan Administrasi Penggajian	BPKAD	Pengelolaan Administrasi Penggajian Pegawai Pemerintah Kab. Kubu Raya	14 Bln daftar gaji	245.472.800	
	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap aturan Pengelolaan Keuangan Daerah	2 kali	15.037.500	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap aturan Pengelolaan Keuangan Daerah	2 kali	15.037.500	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan keuangan Daerah	BPKAD	Peraturan tentang Perbup dan Juknis Pengelolaan Keuangan Daerah	20 Juknis	53.290.700	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan keuangan Daerah	BPKAD	Peraturan tentang Perbup dan Juknis Pengelolaan Keuangan Daerah	20 Juknis	53.290.700	

	penyusunan Rancangan Perda TT. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	PERDA TT. Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD	140 Buku	130.958.300	penyusunan Rancangan Perda TT. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	PERDA TT. Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD	140 Buku	130.958.300	
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tt. Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	PERBUP tt. Penjabaran Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD	140 Buku	98.313.800	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tt. Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	PERBUP tt. Penjabaran Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD	140 Buku	98.313.800	
	Manajemen Sistem Pengelolaan keuangan berbasis Akrual	BPKAD	Persentase Peningkatan sistem Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual	100%	102.123.700	Manajemen Sistem Pengelolaan keuangan berbasis Akrual	BPKAD	Persentase Peningkatan sistem Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual	100%	102.123.700	
	Penyusunan Laporan Keuangan (LRA, LAK, LO, LPE, LP-SAL, NERACA, CaLK	BPKAD	Laporan Keuangan Daerah (LRA, LAK, LO, LPE, LP-SAL, Neraca, CaLK)	20 Buku	121.076.300	Penyusunan Laporan Keuangan (LRA, LAK, LO, LPE, LP-SAL, NERACA, CaLK	BPKAD	Laporan Keuangan Daerah (LRA, LAK, LO, LPE, LP-SAL, Neraca, CaLK)	20 Buku	121.076.300	
	Penyusunan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Semesteran	BPKAD	Pelaporan keuangan semesteran	48 Buku	147.532.900	Penyusunan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Semesteran	BPKAD	Pelaporan keuangan semesteran	48 Buku	147.532.900	

	Pengelolaan Surat penyediaan dana (SPD)	BPKAD	Pengelolaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	12 Bulan	27.477.000	Pengelolaan Surat penyediaan dana (SPD)	BPKAD	Pengelolaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	12 Bulan	27.477.000	
	Penyusunan Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Daerah	BPKAD	Standardisasi biaya pemeliharaan barang daerah	70 Buku	23.072.000	Penyusunan Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Daerah	BPKAD	Standardisasi biaya pemeliharaan barang daerah	70 Buku	23.072.000	
	Inventari Barang daerah	BPKAD	Terlaksana inventarisasi barang milik daerah	90 Buku	181.438.000	Inventari Barang daerah	BPKAD	Terlaksana inventarisasi barang milik daerah	90 Buku	181.438.000	
	Rekonsiliasi laporan keuangan, aset dan Barang Persediaan	BPKAD	Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan, Aset dan Barang Persediaan	1 Kali	46.670.000	Rekonsiliasi laporan keuangan, aset dan Barang Persediaan	BPKAD	Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan, Aset dan Barang Persediaan	1 Kali	46.670.000	
	Manajemen Penatausahaan Barang Daerah	BPKAD	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah	1 Sistem	77.500.000	Manajemen Penatausahaan Barang Daerah	BPKAD	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah	1 Sistem	77.500.000	
	penilaian Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kab. Kubu Raya	BPKAD	Data nilai aset yang sudah di nilai	30 Buku	42.265.000	penilaian Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kab. Kubu Raya	BPKAD	Data nilai aset yang sudah di nilai	30 Buku	42.265.000	

	Penyusunan daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah	BPKAD	Data kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	80 Buku	34.523.000	Penyusunan daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah	BPKAD	Data kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	80 Buku	34.523.000	
	Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah kab. Kubu Raya	BPKAD	Tersedianya data nilai aset yang dihapuskan	40 Buku	60.046.000	Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah kab. Kubu Raya	BPKAD	Tersedianya data nilai aset yang dihapuskan	40 Buku	60.046.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Tersedianya identitas Aset Milik Pemerintah Daerah	30 unit	77.744.900	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Tersedianya identitas Aset Milik Pemerintah Daerah	30 unit	77.744.900	
	Manajemen Aplikasi pemetaan Aset daerah	BPKAD	Terlaksananya pemetaan aset daerah berbasis geogle map	1 Aplikasi	85.944.000	Manajemen Aplikasi pemetaan Aset daerah	BPKAD	Terlaksananya pemetaan aset daerah berbasis geogle map	1 Aplikasi	85.944.000	
	Penyelesaian TGR (Tuntutan Ganti rugi) keuangan dan Barang Milik Daerah (Kerugian daerah)	BPKAD	Terlaksananya Penyelesaian TGR Keuangan dan Barang Milik Daerah	11 OPD	41.220.000	Penyelesaian TGR (Tuntutan Ganti rugi) keuangan dan Barang Milik Daerah (Kerugian daerah)	BPKAD	Terlaksananya Penyelesaian TGR Keuangan dan Barang Milik Daerah	11 OPD	41.220.000	
	Penyusunan standar satuan Harga	BPKAD	Standar Satuan Harga Kabupaten Kubu Raya	90 Buku	45.010.000	Penyusunan standar satuan Harga	BPKAD	Standar Satuan Harga Kabupaten Kubu Raya	90 Buku	45.010.000	

6	Program Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan ketatalaksanaan dan aparatur daerah	BPKAD	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan aparatur Pemerintah Daerah	100%	42.000.000	Program Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan ketatalaksanaan dan aparatur daerah	BPKAD	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan aparatur Pemerintah Daerah	100%	42.000.000	
	peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	BPKAD	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik	1 Tahun	9.000.000	peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	BPKAD	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik	1 Tahun	9.000.000	
	Penyusunan Data Base E Formasi	BPKAD	Penyusunan database kebutuhan pegawai, menentukan kelas jabatan dan menentukan sasaran kerja pegawai	6 Buku	8.000.000	Penyusunan Data Base E Formasi	BPKAD	Penyusunan database kebutuhan pegawai, menentukan kelas jabatan dan menentukan sasaran kerja pegawai	6 Buku	8.000.000	
	penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	BPKAD	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	6 Buku	7.000.000	penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	BPKAD	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	6 Buku	7.000.000	
	Penyusunan Survei kepuasan Masyarakat	BPKAD	Terlaksana penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	6 Buku	9.000.000	Penyusunan Survei kepuasan Masyarakat	BPKAD	Terlaksana penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	6 Buku	9.000.000	

	Penyusunan Standar Pelayanan	BPKAD	Terlaksananya standar pelayanan BPKAD	4 Buku	9.000.000	Penyusunan Standar Pelayanan	BPKAD	Terlaksananya standar pelayanan BPKAD	4 Buku	9.000.000	
7	Program perencanaan Pembangunan Daerah	BPKAD	Persentase Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	100%	8.500.000	Program perencanaan Pembangunan Daerah	BPKAD	Persentase Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	100%	8.500.000	
	penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan evaluasi SKPD	BPKAD	Terlaksanya penyusunan data BPKAD dalam sistem informasi pembangunan monitoring dan evaluasi	5 Buku	8.500.000	penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan evaluasi SKPD	BPKAD	Terlaksanya penyusunan data BPKAD dalam sistem informasi pembangunan monitoring dan evaluasi	5 Buku	8.500.000	

5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari pemangku kepentingan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintah, dan masyarakat. Pada tahun 2018, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye dan mempertimbangkan hal penting lainnya, serta serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui prioritas nasional dalam rangka pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan presiden lainnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, terdapat 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional yaitu:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Perumahan dan Permukiman;
4. Pembangunan Dunia Usaha dan Pariwisata;
5. Ketahanan Energi;
6. Ketahanan Pangan;
7. Penanggulangan Kemiskinan;
8. Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman;
9. Pembangunan Wilayah;
10. Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan; dan
11. Asian Games dan Asian Para Games.

Dari Prioritas Pembangunan Nasional tersebut, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait dengan Prioritas Pembangunan Nasional ke 10 (sepuluh) yaitu Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan karena salah satu sasaran umum Prioritas Nasional Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan yaitu Sasaran Pembangunan Aparatur Negara yaitu Opini WTP atas Laporan Keuangan (K/L; Prov; Kab; Kota). Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus mewujudkan tercapainya prioritas pembangunan nasional dan sasaran pembangunan aparatur negara tersebut melalui pelaksanaan program dan kegiatan

yang dapat memacu dan mendorong terealisasinya Opini WTP atas Laporan Keuangan (K/L; Prov; Kab; Kota) sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memacu terealisasinya Opini WTP atas Laporan Keuangan dengan menetapkan Opini WTP sebagai indikator kinerja pada sasaran strategisnya.

Arah Kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional di bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan yaitu:

1. Meningkatkan penguatan pertahanan;
2. Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan;
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat; dan
4. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait dengan arah kebijakan ke 4 (empat). Arah kebijakan “Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi” memiliki 4 (empat) sasaran kegiatan yang menjadi prioritas dengan dasar penetapan efisiensi tata laksana penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien, serta peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sasaran kegiatan tersebut yaitu:

1. Perluasan Implementasi E-Government yang terintegrasi;
2. Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan;

3. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Manajemen SDM aparatur; dan
4. Peningkatan Integritas dan akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupaya untuk mewujudkan arah kebijakan “Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi” melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2014-2019, tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel, dan transparan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah:

- a. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator kinerjanya sebagai berikut:
 - 1) Ketepatan waktu Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - 2) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - 3) Persentase Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
 - 4) Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- 5) Persentase Laporan Penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial yang disampaikan sesuai aturan.
- b. Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap standar laporan keuangan, dengan indikator kinerjanya persentase Perangkat daerah yang menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar akuntansi Pemerintah (SAP).
- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset, dengan indikator kinerjanya sebagai berikut:
 - 1) Persentase Perangkat daerah yang melakukan pengelolaan aset sesuai standar; dan
 - 2) Persentase Pencatatan Aset Tetap.
- d. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan indikator kinerjanya yaitu nilai SAKIP.

3.2 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Hal ini berarti kegiatan merupakan bagian dari program dan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Kabupaten Kubu Raya serta Sasaran Jangka Menengah RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 7 (Tujuh) Program dan 62 (enam puluh dua) kegiatan dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018. Program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp499.058.000,00;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp222.188.000,00;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp146.850.000,00;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp46.261.500,00;
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kegiatan dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp3.686.768.775,00;
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp8.500.000,00;
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan aparatur Pemerintah Daerah terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp42.000.000,00; dan

Dari 7 (Tujuh) program dan 62 (enam puluh dua) kegiatan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengusulkan total kebutuhan dana/ pagu indikatif tahun anggaran 2018 sebesar Rp4.651.626.275,00.

Prakiraan maju tahun anggaran 2019 sebesar Rp6.388.592.985,00 terjadi kenaikan pagu belanja prakiraan maju sebesar Rp1.736.966.710,00. Rumusan Rencana Program Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kubu Raya adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Kubu Raya

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
I														
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang														
4	04	01	01	01		Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	BPKAD	100%	499.058.000	APBD		100%	487.298.200
4	04	01	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor roda empat dan roda dua	BPKAD	22 Unit	3.825.000	APBD		23 Unit	5.825.000
4	04	01	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangn	Terlaksananya petugas pekerja dan kelengkapan administrasi keuangan	BPKAD					1 Tahun	4.965.000

4	04	01	01	01	08	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Tersedianya petugas, peralatan dan bahan pembersih	BPKAD	1 Tahun	27.400.000	APBD		1 Tahun	29.200.000
4	04	01	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Kebutuhan alat Tulis Kantor	BPKAD	1 Tahun	59.790.000	APBD		1 Tahun	46.368.100
4	04	01	01	01	11	Penyediaan Barang cetakan Dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	1 Tahun	32.230.000	APBD		1 Tahun	29.050.000
4	04	01	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik /penerangan bangunan kantor	BPKAD	1 Tahun	5.500.000	APBD		1 Tahun	6.550.000
4	04	01	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Penyediaan bahan informasi/ koran	BPKAD	2720 Eksemplar	7.700.000	APBD		2720 Eksemplar	10.204.800
4	04	01	01	01	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Penyediaan makanan dan minum rapat	BPKAD	1200 Kotak	39.000.000	APBD		1200 Kotak	40.000.000
4	04	01	01	01	18	Rapat koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	koordinasi & Konsultasi ke ibu kota negara dan daerah lain	BPKAD	17 kali	141.400.000	APBD		17 kali	132.850.000
4	04	01	01	01	19	Rapat koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	koordinasi & Konsultasi dalam kabupaten/ kecamatan	BPKAD	10 kali	8.933.000	APBD		15 kali	17.866.000

4	04	01	01	01	25	Penataan Arsip/Dokumen Pengelolaan Keuangan	Penataan arsip/ dokumen pengelolaan keuangan SKPD	BPKAD	1 Tahun	173.280.000	APBD		1 Tahun	164.419.300
4	04	01	01	02		PROGRAM peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur	BPKAD	100%	222.188.000	APBD		100%	333.600.000
4	04	01	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	1 Unit	4.550.000	APBD		1 Unit	2.000.000
4	04	01	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	peralatan Gedung Kantor	BPKAD	23 unit	54.338.000	APBD		10 unit	56.900.000
4	04	01	01	02	12	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Tersedianya Bangunan dan ruangan Gedung Arsip	BPKAD	1 Unit	80.000.000	APBD		3 Unit	160.000.000
5	04	01	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala edung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan gudang dokumen	BPKAD					1 Tahun	5.400.000
4	04	01	01	02	24	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Berkala Kendaraan Dinas Operasional Roda 4(empat)	BPKAD	1 Unit	50.300.000	APBD		2 Unit	50.300.000
4	04	01	01	02	26	Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	1 Tahun	14.000.000	APBD		1 Tahun	15.000.000

4	04	01	01	02	28	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan berkala peralatan Gedung kantor (mesin foto kopi)	BPKAD	1 Tahun	4.000.000	APBD		1 Tahun	4.000.000
4	04	01	01	02	30	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Komputer	Berfungsinya peralatan komputer dengan baik	BPKAD	1 Tahun	15.000.000	APBD		1 Tahun	20.000.000
4	04	01	01	02		Pemeliharaan Website	Berfungsinya Website BPKAD Kab. Kubu Raya				APBD		1 Unit	20.000.000
4	04	01	01	03		PROGRAM Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur						100%	20.700.000
4	04	01	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas						69 Stel	20.700.000
4	04	01	01	05		PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BPKAD	100%	146.850.000	APBD		100%	136.300.000
4	04	01	01	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundangan	Pengiriman peserta Bimtek	BPKAD	7 Orang	75.550.000	APBD		8 Orang	76.000.000

4	04	01	01	05	07	Penyusunan Evaluasi Jabatan BPKAD	Terlaksananya Evaluasi Jabatan	BPKAD	5 Buku	10.000.000	APBD			
5	04	01	01	05	27	Pengelolaan Dokumen Kepegawaian	Pengelolaan DUK, SKP, Kenaikan Gaji Berkala, Inpassing, Cuti, Usulan Kenaikan Pangkat, daftar hadir, dankartu induk pegawai	BPKAD	69 PNS dan Non PNS	61.300.000	APBD		69 PNS dan Non PNS	60.300.000
4	04	01	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	BPKAD	100%	46.261.500	APBD		100%	37.000.000
4	04	01	01	06	01	Penyusunan Lapopran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPKAD	BPKAD	8 Buku	10.000.000	APBD		8 Buku	10.000.000
4	04	01	01	06	02	Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran Tiap tahun	BPKAD	5 Buku	7.261.500	APBD		5 Buku	7.500.000
4	04	01	01	06	04	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	laporan Keuangan akhir tahun SKPD	BPKAD	10 Buku	9.500.000	APBD		10 Buku	10.000.000

4	04	01	01	06	12	Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah / LPPD	Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	BPKAD	8 Buku	10.000.000	APBD			
4	04	01	01	06	08	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Dokumen RKA, DPA, dan DPPA	BPKAD	4 Dok	9.500.000	APBD		4 Dok	9.500.000
4	04	01	01	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Daerah	BPKAD	100%	3.686.768.775	APBD		100%	5.339.194.785
4	04	01	01	17	06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Perda APBD	BPKAD	320 Buku	534.236.000	APBD		320 Buku	589.536.000
4	04	01	01	17	07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Pebup APBD	BPKAD	140 Buku	199.525.000	APBD		140 Buku	241.275.000
4	04	01	01	17	08	Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Perda perubahan APBD	BPKAD	337 Buku	168.922.250	APBD		300 Buku	209.400.000
4	04	01	01	17	09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	PERBUP perubahan APBD	BPKAD	420 Buku	277.494.400	420 Buku		1 Dokumen	286.294.400

4	04	01	01	17	68	Asistensi Penyusunan RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD	Peningkatan pemahaman SKPD dalam Penyusunan SKPD dalam penyusunan DPA, DPPA, SPD dan Anggaran Kas	BPKAD	36 PD	192.678.400	APBD		36 PD	204.378.400
4	04	01	01	17	53	Penatausahaan Keuangan Satuan kerja Pengelolaan keuangan Daerah (SKPKD)	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPKD	BPKAD	12 Dok	13.520.600	APBD		12 Dok	30.000.000
4	04	01	01	17	144	Peningkatan Pengelolaan Anggaran	Bertambahnya pemahaman aparatur akan pengelolaan keuangan SKPD	BPKAD	36 PD	54.238.000	APBD		36 PD	54.238.000
4	04	01	01	17	118	Manajemen aplikasi SIMDA	Pelaksanaan Penataan Dokumen SKPD dalam SIMDA	BPKAD	1 Dokumen	41.806.000	APBD		1 Dokumen	41.806.000
4	04	01	01	17	79	Penyusunan Data Dasar, Rekonsiliasi Data Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil)	Terlaksananya Rekonsiliasi Data dan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil)	BPKAD	1 Tahun	64.178.450	APBD		1 Tahun	88.905.900
4	04	01	01	17	24	Penatausahaan Keuangan daerah	Penerbitan surat Perintah Penyediaan Dana Pemerintah Kab. Kubu Raya	BPKAD	9226 SP2D	418.647.175	APBD		9226 SP2D	456.881.700

4	04	01	01	17	137	Rekonsiliasi Penggajian	Terlaksanya Rekonsiliasi Data Gaji KKR dengan Kemenkeu/Bapetarium/PT. Taspen dan BPJS	BPKAD	2 Kali	64.806.600	APBD		3 Kali	65.000.000
4	04	01	01	17	23	Penataan Administrasi Penggajian	Pengelolaan Administrasi Penggajian Pegawai Pemerintah Kab. Kubu Raya	BPKAD	14 Bln Daftar Gaji	245.472.800	APBD		14 Bln Daftar Gaji	245.472.850
4	04	01	01	17	14	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pemahaman aparaturnya terhadap aturan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	2 kali	15.037.500	APBD		4 kali	10.648.850
4	04	01	01	17	04	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan keuangan Daerah	Peraturan tentang Perbup dan Juknis Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	20 Juknis	53.290.700	APBD		20 Juknis	63.790.750
4	04	01	01	17	10	penyusunan Rancangan Perda TT. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	PERDA TT. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	140 Buku	130.958.300	APBD		140 Buku	197.812.750

4	04	01	01	17	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tt. Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	PERBUP tt. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	140 Buku	98.313.800	APBD		140 Buku	196.897.230
4	04	01	01	17	76	Manajemen Sistem Pengelolaan keuangan berbasis Akrual	Persentase Peningkatan sistem Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual	BPKAD	100%	102.123.700	APBD		100%	115.013.900
5	04	01	01	17	119	Pembinaan penyusunan laporan fungsional bendahara SKPD	laporan fungsional bendahara SKPD sesuai ketentuan						36 PD	68.839.970
6	04	01	01	17	120	Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)							1 Dokumen	294.422.500
4	04	01	01	17	28	Penyusunan Laporan Keuangan (LRA, LAK, LO, LPE, LP-SAL, NERACA, CaLK)	Laporan Keuangan Daerah (LRA, LAK, LO, LPE, LP-SAL, Neraca, CaLK)	BPKAD	20 Buku	121.076.300	APBD		20 Buku	157.182.700
4	04	01	01	17	141	Penyusunan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Semesteran	Pelaporan keuangan semesteran	BPKAD	48 Buku	147.532.900	APBD		48 Buku	134.063.435
4	04	01	01	17	29	Pembinaan Akuntansi SKPD Berbasis Akrual	Peningkatan pemahaman SKPD dalam Akuntansi berbasis akrual (PP.71)							

4	04	01	01	17	147	Pengelolaan Surat penyediaan dana (SPD)	Pengelolaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	BPKAD	12 Bulan	27.477.000	APBD		12 Bulan	28.500.000
4	04	01	01	17	91	Penyusunan Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Daerah	Standarisasi biaya pemeliharaan barang daerah	BPKAD	70 Buku	23.072.000	APBD		70 Buku	30.000.000
4	04	01	01	17	49	Inventarisasi Barang daerah	Terlaksanya inventarisasi barang milik daerah	BPKAD	90 Buku	181.438.000	APBD		50 Buku	171.816.750
4	04	01	01	17	55	Rekonsiliasi laporan keuangan, aset dan Barang Persediaan	Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan, Aset dan Barang Persediaan	BPKAD	1 Kali	46.670.000	APBD		1 Kali	39.263.150
4	04	01	01	17	16	Manajemen Penatausahaan Barang Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah	BPKAD	1 Sistem	77.500.000	APBD		1 Sistem	509.823.650
4	04	01	01	17		Sensus Barang Milik Daerah	Informasi dan Data Barang Milik Daerah				APBD		1 Dokumen	221.252.100

4	04	01	01	17	50	penilaian Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kab. Kubu Raya	Data nilai aset yang sudah di nilai	BPKAD	30 Buku	42.265.000	APBD		30 Buku	44.700.000
4	04	01	01	17	51	Penyusunan daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah	Data kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	BPKAD	80 Buku	34.523.000	APBD		80 Buku	36.109.000
4	04	01	01	17	74	Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah kab. Kubu Raya	Tersedianya data nilai aset yang dihapuskan	BPKAD	40 Buku	60.046.000	APBD		40 Buku	69.296.600
4	04	01	01	17	92	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya identitas Aset Milik Pemerintah Daerah	BPKAD	30 Unit	77.744.900	APBD		50 Unit	107.700.000
5	04	01	01	17	92	Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset daerah	Meningkatnya kemampuan manajemen pengurus dan penyimpan barang	BPKAD					100 Orang	150.000.000
4	04	01	01	17	148	Manajemen Aplikasi pemetaan Aset daerah	Terlaksananya pemetaan aset daerah berbasis geogle map	BPKAD	1 Aplikasi	85.944.000	APBD		1 Aplikasi	61.300.000

4	04	01	01	17	140	Penyelesaian Kerugian Daerah	Terlaksananya Penyelesaian TGR Keuangan dan Barang Milik Daerah	BPKAD	11 PD	41.220.000	APBD		11 PD	25.500.000
4	04	01	01	17	02	Penyusunan standar satuan Harga	Standar Satuan Harga Kabupaten Kubu Raya	BPKAD	90 Buku	45.010.000	APBD		90 Buku	92.073.200
4	04	01	01	33		Program Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan ketatalaksanaan dan aparatur daerah	Terlaksananya Pelayanan Publik	BPKAD	100%	42.000.000	APBD		100%	16.000.000
4	04	01	01	33	29	peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik	BPKAD	1 Tahun	9.000.000	APBD		1 Tahun	7.000.000
4	04	01	01	33	26	Penyusunan Data Base E Formasi	Penyusunan database kebutuhan pegawai, menentukan kelas jabatan dan menentukan sasaran kerja pegawai	BPKAD	6 Buku	8.000.000	APBD			
4	04	01	01	33	27	penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	BPKAD	6 Buku	7.000.000	APBD			

4	04	01	01	33	32	Penyusunan Survei kepuasan Masyarakat	Terlaksanya penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	BPKAD	6 Buku	9.000.000	APBD		6 Buku	9.000.000
4	04	01	01	33	33	Penyusunan Standar Pelayanan	Terlaksananya standar pelayanan BPKAD	BPKAD	4 Buku	9.000.000	APBD			
4	04	01	01	21		Program perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah	BPKAD	100%	8.500.000	APBD		100%	18.500.000
4	04	01	01	21	44	Penyusunan Renstra SKPD	Renstra SKPD	BPKAD			APBD		1 Dokumen	10.000.000
4	04	01	01	21	80	penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan evaluasi SKPD	Terlaksanya penyusunan data BPKAD dalam sistem informasi pembangunan monitoring dan evaluasi	BPKAD	5 Buku	8.500.000	APBD		5 Buku	8.500.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 dituangkan dalam Program dan Kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya. Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Program /Kegiatan	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	499.058.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	3.825.000
	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	27.400.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	59.790.000
	Penyediaan Barang cetakan Dan Penggandaan	32.230.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	7.700.000
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	39.000.000
	Rapat koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	141.400.000
	Rapat koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	8.933.000
	Penataan Arsip/Dokumen Pengelolaan Keuangan	173.280.000
2	PROGRAM peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	222.188.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4.550.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	54.338.000
	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	80.000.000
	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	50.300.000
	Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	14.000.000
	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4.000.000
	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Komputer	15.000.000
3	PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	146.850.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundangan	75.550.000
	Penyusunan Evaluasi Jabatan BPKAD	10.000.000
	Pengelolaan Dokumen Kepegawaian	61.300.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan capaian Kinerja dan Keuangan	46.261.500
	Penyusunan Lapopran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/penyusunan Laporan Kinerja Tahunan(LKT)	10.000.000
	Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	7.261.500
	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	9.500.000

	Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah / LPPD	10.000.000
	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	9.500.000
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	3.686.768.775
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	534.236.000
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	199.525.000
	Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	168.922.250
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	277.494.400
	Asistensi Penyusunan RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD	192.678.400
	Penatausahaan Keuangan Satuan kerja Pengelolaan keuangan Daerah (SKPKD)	13.520.600
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Anggaran SKPD	54.238.000
	Manajemen aplikasi SIMDA	41.806.000
	Penyusunan Data Dasar, Rekonsiliasi Data Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil)	64.178.450
	Penatausahaan Keuangan daerah	418.647.175
	Rekonsiliasi Penggajian	64.806.600
	Penataan Administrasi Penggajian	245.472.800
	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	15.037.500
	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan keuangan Daerah	53.290.700
	penyusunan Rancangan Perda TT. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	130.958.300
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tt. Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	98.313.800
	Manajemen Sistem Pengelolaan keuanggan berbasis Akrual	102.123.700
	Penyusunan Laporan Keuangan (LRA, LAK, LO, LPE, LP-SAL, NERACA, CaLK	121.076.300
	Penyusunan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Semesteran	147.532.900
	Pengelolaan Surat penyediaan dana (SPD)	27.477.000
	Penyusunan Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Daerah	23.072.000
	Inventari Barang daerah	181.438.000
	Rekonsiliasi laporan keuangan, aset dan Barang Persediaan	46.670.000
	Manajemen Penatausahaan Barang Daerah	77.500.000
	penilaian Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kab. Kubu Raya	42.265.000
	Penyusunan daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah	34.523.000
	Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah kab. Kubu Raya	60.046.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah	77.744.900
	Manajemen Aplikasi pemetaan Aset daerah	85.944.000
	Penyelesaian TGR (Tuntutan Ganti rugi) keuangan dan Barang Milik Daerah (Kerugian daerah)	41.220.000
	Penyusunan standar satuan Harga	45.010.000
6	Program Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan ketatalaksanaan dan aparatur daerah	42.000.000
	peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	9.000.000

	Penyusunan Data Base E Formasi	8.000.000
	penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	7.000.000
	Penyusunan Survei kepuasan Masyarakat	9.000.000
	Penyusunan Standar Pelayanan	9.000.000
7	Program perencanaan Pembangunan Daerah	8.500.000
	penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan evaluasi SKPD	8.500.000
8	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	0
	Pembuatan Website	0
Jumlah		4.651.626.275

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya 2015– 2019 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta tujuan dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Harapan yang hendak diraih dari penyusunan Renja ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan satuan kerja pemerintah daerah semakin meningkat dan berkualitas. Renja juga diharapkan mampu mengantisipasi tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya di waktu yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Mengacu pada ketentuan tersebut, Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu dilakukan perubahan karena dalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sampai dengan Triwulan II, pelaksanaan program dan kegiatan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan sebagaimana disebutkan dalam poin a dan b. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD kabupaten Kubu Raya Tahun 2018; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2018.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kubu Raya dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sistem Rencana Pembangunan Daerah; dan
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah ini yaitu:

1. Memberikan informasi hasil pengendalian/evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Memberikan informasi tingkat kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah.
3. Menetapkan komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dijadikan tolok ukur kinerja sehingga terdapat kepastian dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini yaitu:

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2018.
2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018.
3. Memberikan alternatif pemecahan permasalahan.
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan anggaran untuk peningkatan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018, meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan alasan perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2018.

1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan

Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2018.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan

- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian program/ kegiatan Tahun 2018, perubahan, pergeseran, dan penambahan program/ kegiatan baru, serta perubahan target kinerja, pagu indikatif, dan lokasi kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan kajian/ *review* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 dan perkiraan dan keterkaitan dengan pencapaian target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan realisasi program dan pelaksanaan Renja BPKAD tahun-tahun sebelumnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 8 (delapan) Program dan 68 (enam puluh delapan) kegiatan pada Renja Perubahan tahun 2018. Sedangkan pada Renja tahun 2018, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 7 (tujuh) Program dan 62 (enam puluh dua) kegiatan. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Evaluasi Renja Perangkat Daerah
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018
Kabupaten Kubu Raya

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
I	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	3.012.959.692	60	1.590.087.455	20	499.058.000	5	96.764.752	5	128.798.129	-	-	-	-	10	225.562.881	70	1.815.650.336	70,00	60,26	Sekretariat	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman surat	3	Thn	1.500.000	3	789.000											-	-	3	789.000	100,00	52,60	Sekretariat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air & Listrik	Tersedianya air dan listrik di ruko penyimpanan dokumen	2	Thn	162.000.000	2	98.570.500												-	-	2	98.570.500	100,00	60,85	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor roda empat dan roda dua	77	Unit	14.650.000	32	4.850.500	22	3.825.000			9	2.296.700						9	2.296.700	41	7.147.200	53,25	48,79	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya penyediaan petugas pekerja dan kelengkapan administrasi keuangan	4	Thn	423.765.000	3	400.220.000												-	-	3	400.220.000	75,00	94,44	Sekretariat

	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Tersedianya petugas, peralatan dan bahan pembersih	5	Thn	185.224.650	3	104.567.125	1	27.400.000	0	4.761.500	0	6.488.500					1	11.250.000	4	115.817.125	70,00	62,53	Sekretariat																	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Kebutuhan alat Tulis Kantor	5	Thn	265.915.200	3	151.725.350	1	59.790.000	0	6.705.450	0	15.516.550					1	22.222.000	4	173.947.350	70,00	65,41	Sekretariat																	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	5	Thn	161.530.000	3	70.001.000	1	32.230.000	0	6.807.500	0	2.707.500					1	9.515.000	4	79.516.000	70,00	49,23	Sekretariat																	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik /penerangan bangunan kantor	5	Thn	29.700.000	3	17.650.000	1	5.500.000	0	2.750.000	0	-					1	2.750.000	4	20.400.000	70,00	68,69	Sekretariat																	
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Penyediaan bahan informasi/ koran	145 29	Eks	47.161.000	862 0	22.000.000	272 0	7.700.000	680	641.000	680	1.925.000					1.360	2.566.000	9.98 0	24.566.000	68,69	52,09	Sekretariat																	
	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minum rapat	699 1	Ktk	187.200.000	456 0	101.225.000	120 0	39.000.000	300	6.500.000	300	9.750.000					600	16.250.000	5.16 0	117.475.000	73,81	62,75	Sekretariat																	
	Rapat koordinasi & Konsultasi luar Daerah	koordinasi & Konsultasi ke ibu kota negara dan daerah lain	87	Kali	660.515.042	39	228.065.380	17	141.400.000	1	32.626.152	10	54.348.079					11	86.974.231	50	315.039.611	57,47	47,70	Sekretariat																	
	Rapat koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	koordinasi & Konsultasi dalam kabupaten/ kecamatan	60	Kali	72.531.000	30	24.433.500	10	8.933.000	1	3.250.000	8	5.050.000					9	8.300.000	39	32.733.500	65,00	45,13	Sekretariat																	
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan SOP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22	Buk u	22.527.500	22	19.093.100											-	-	22	19.093.100	100,00	84,75	Sekretariat																	
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	keamanan sarana dan prasarana kantor	1	Thn	86.250.000	1	77.200.000											-	-	1	77.200.000	100,00	89,51	Sekretariat																	
	Penataan Arsip/Dokumen Pengelolaan Keuangan	Penataan arsip/ dokumen pengelolaan keuangan SKPD	5	Thn	692.490.300	3	269.697.000	1	173.280.000	0	32.723.150		30.715.800					0	63.438.950	3	333.135.950	65,00	48,11	Sekretariat																	
Rata-Rata Capaian Kinerja %																																									
Predikat Kinerja																																									
	PROGRAM Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur	100	%	2.821.295.235	60	1.824.218.150	20	222.188.000	5	136.750.000	17	36.649.400	-	-	-	-	22	173.399.400	82	1.997.617.550	82,25	70,80	Sekretariat																	
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	kendaraan dinas/operasional	11	Unit	436.375.000	11	405.414.000						-					-	-	11	405.414.000	100,00	92,90	Sekretariat																	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Perlengkapan Gedung kantor	29	Unit	73.325.600	23	65.875.600	1	4.550.000	1	4.550.000		-					1	4.550.000	24	70.425.600	82,76	96,05	Sekretariat																	

	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	peralatan Gedung kantor	87	Unit	989.648.900	54	640.550.700	23	54.338.000	7	30.800.000	16	21.428.000					23	52.228.000	77	692.778.700	88,51	70,00	Sekretariat	
	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya Meubeleur	65	Unit	112.150.000	57	79.964.000												-	-	57	79.964.000	87,69	71,30	Sekretariat
	Penyediaan Sewa Gedung / Kantor / Tempat	Tersedianya bangunan dan ruangan gedung arsip	10	Unit	702.000.000	6	376.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000								1	80.000.000	7	456.000.000	70,00	64,96	Sekretariat
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan gudang dokumen	8	Unit	59.551.210	6	12.115.000												-	-	6	12.115.000	75,00	20,34	Sekretariat
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Berkala kendaraan dinas operasional roda 4 (empat)	6	Unit	222.325.000	3	104.060.850	1	50.300.000	0	6.900.000	0	14.221.400						1	21.121.400	4	125.182.250	58,33	56,31	Sekretariat
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor	Pemeliharaan berkala perlengkapan Gedung kantor	5	Thn	88.000.000	3	58.500.000	1	14.000.000	0	7.000.000	0	-						1	7.000.000	4	65.500.000	70,00	74,43	Sekretariat
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	Pemeliharaan berkala peralatan Gedung kantor (mesin foto kopi)	5	Thn	26.919.525	3	16.811.000	1	4.000.000		-	1	1.000.000						1	1.000.000	4	17.811.000	70,00	66,16	Sekretariat
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer	Berfungsinya peralatan komputer dengan baik	5	Thn	111.000.000	3	64.927.000	1	15.000.000	0	7.500.000	0	-						1	7.500.000	4	72.427.000	70,00	65,25	Sekretariat
	Pemeliharaan Website	Berfungsinya Website BPKAD Kab. Kubu Raya	1	Unit	20.000.000														-	-	-	-	-	0,00	Sekretariat
Rata-Rata Capaian Kinerja %										20,31	61,55		16,49					93,10	78,04						
Predikat Kinerja										SR	R		SR					ST	T						
	PROGRAM Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	145.890.000	100	106.600.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	106.600.000	100,00	73,07	Sekretariat
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	200	Stel	134.890.000	131	98.460.000												-	-	131	98.460.000	65,50	72,99	Sekretariat
	Pengadaan Pakaian olah raga	pakaian olah raga	53	Stel	11.000.000	53	8.140.000												-	-	53	8.140.000	100,00	74,00	Sekretariat
Rata-Rata Capaian Kinerja %																									
Predikat Kinerja																									
	PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	100	%	591.872.000	60	235.808.368	20	146.850.000	5	27.200.000	5	54.033.296	-	-	-	-	10	81.233.296	70	317.041.664	70,00	53,57	Sekretariat	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Pengiriman peserta Bimtek	38	Org	387.025.000	23	174.775.068	7	75.550.000	2	19.000.000	2	35.285.346					4	54.285.346	27	229.060.414	71,05	59,18	Sekretariat	

	Penyusunan Evaluasi Jabatan BPKAD	Terlaksananya Evaluasi Jabatan	20	Buku	48.447.000	15	26.697.300	5	10.000.000		-		-				-	-	15	26.697.300	75,00	55,11	Sekretariat	
	Pengelolaan Dokumen Kepegawaian	Pengelolaan DUK, SKP, Kenaikan Gaji Berkala, Inpassing, Cuti, Usulan Kenaikan Pangkat, daftar hadir, dankartu induk pegawai	207	PNS & Non PNS	140.600.000	69	19.000.000	69	61.300.000	20	8.200.000	25	18.747.950				45	26.947.950	114	45.947.950	55,07	32,68	Sekretariat	
	Pembelajaran Dikantor Sendiri (Inhouse Training)	Terlaksananya latihan pembelajaran di kantor sendiri	1	Kali	5.800.000	1	5.510.000						-			-	-	1	5.510.000	100,00	95,00	Sekretariat		
	Penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB)	Terlaksananya Analisis Jabatan SKPD	6	Buku	10.000.000	1	9.826.000						-			-	-	1	9.826.000	16,67	98,26	Sekretariat		
Rata-Rata Capaian Kinerja %																		60,49	55,32					
Predikat Kinerja																			R	R				
	PROGRAM Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100		189.435.000	60	94.554.600	20	36.261.500	5	5.163.000	14	11.538.400	-	-	-	-	19	16.701.400	79	111.256.000	79,00	58,73	Sekretariat
	Penyusunan Laporan keuangan semesteran	Terlaksananya laporan keuangan semesteran	25	Buku	50.666.500	15	20.808.900	5	7.261.500				-			-	-	15	20.808.900	60,00	41,07	Sekretariat		
	Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun SKPD	50	Buku	73.232.000	30	45.304.800	10	9.500.000		2.715.000	5	4.755.600				5	7.470.600	35	52.775.400	70,00	72,07	Sekretariat	
	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah / LPPD	Tersedianya Laporan LPPD dan LKPJ BPKAD	32	Buku	37.536.500	24	21.440.900	8	10.000.000		2.448.000	8	6.782.800				8	9.230.800	32	30.671.700	100,00	81,71	Sekretariat	
	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Terlaksananya penyusunan Renja, RKA, DPA, dan DPPA	12	Buku	28.000.000	4	7.000.000	4	9.500.000			1	-				1	-	5	7.000.000	41,67	25,00	Sekretariat	
Rata-Rata Capaian Kinerja %																		51,85	46,06					
Predikat Kinerja																		R	SR					

		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	100	%	16.490.580.945	60	8.756.504.385	20	2.721.679.275	5	398.313.346	5	574.566.065	-	-	-	-	10	972.879.411	70	9.729.383.796	70,00	59,00	
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Perda APBD	1.640	Buku	2.181.755.400	1000	908.493.505	320	534.236.000		127.570.019		128.586.850					-	256.156.869	1.000	1.164.650.374	60,98	53,38	Bid. Anggaran
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Perbup APBD	750	Buku	987.922.750	470	458.694.200	140	199.525.000		7.975.000		-					-	7.975.000	470	466.669.200	62,67	47,24	Bid. Anggaran
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD	Perda Perubahan APBD	1.574	Buku	1.047.874.250	900	503.075.758	337	168.922.250				24.855.350					-	24.855.350	900	527.931.108	57,18	50,38	Bid. Anggaran
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran perubahan APBD	Perbup Perubahan APBD	1.920	Buku	1.163.093.400	1080	514.525.927	420	277.494.400		25.649.732		61.459.150					-	87.108.882	1.080	601.634.809	56,25	51,73	Bid. Anggaran
		Asistensi Penyusunan DPA, DPPA, SPD dan Anggaran Kas SKPD	peningkatan pemahaman SKPD dalam Penyusunan RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD	190	SKPD	1.262.859.400	118	715.247.450	36	192.678.400	36	28.875.000		39.104.150					36	67.979.150	154	783.226.600	81,05	62,02	Bid. Anggaran
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Peserta Birmtk pengelolaan keuangan SKPD (berbasis akrual)	28	Org	289.852.900	28	208.267.029						-					-	-	28	208.267.029	100,00	71,85	Bid. Penatausahaan
		Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	Persentase peningkatan pengetahuan Administrasi Keuangan desa	200	%	126.104.375	200	61.567.875						-					-	-	200	61.567.875	100,00	48,82	Bid. Akuntansi dan Pelaporan
		Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPKD	60	Dokumen	267.875.500	36	127.821.652	12	13.520.600	3	6.426.550	3	600.000					6	7.026.550	42	134.848.202	70,00	50,34	Bid. Penatausahaan
		Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Anggaran	Peremuan Perencanaan penganggaran SKPD Kubu Raya	82	SKPD	419.788.700	82	363.796.520						-					-	-	82	363.796.520	100,00	86,66	Bid. Anggaran
		Peningkatan Pengelolaan Anggaran SKPD	Bertambahnya pemahaman aparatur akan pengelolaan keuangan SKPD	149	SKPD	220.862.700	77	105.959.572	36	54.238.000			10	27.456.000					10	27.456.000	87	133.415.572	58,39	60,41	Bid. Anggaran

	Bimtek Tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bagi Pengelolaan Keuangan	Peningkatan pengetahuan SDM SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah	41	SKPD	42.506.300	41	37.249.300											41	37.249.300	100,00	87,63	Bid. Akuntansi dan Pelaporan		
	Penyusunan Laporan Keuangan (LRA, LAK, LO, LPE, LP-SAL, Neraca, CaLK) 2015-2017	Laporan Keuangan Daerah (LRA, LAK, LO, LPE, LP-SAL, Neraca, CaLK)	102	Buku	816.944.325	62	503.644.235	20	121.076.300	10	36.392.500	10	52.109.312					20	88.501.812	82	592.146.047	80,39	72,48	Bid. Akuntansi dan Pelaporan
	Konsolidasi dan Konsultasi Penganggaran	Terlaksananya penganggaran SKPD se Kab. Kubu Raya	1	Kegiatan	84.895.400	1	81.941.062											-	-	1	81.941.062	100,00	96,52	Bid. Anggaran
	Pengelolaan Surat Penyediaan Dana (SPD)	Pengelolaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	24	Bulan	55.977.000			12	27.477.000	3		3	12.557.750					6	12.557.750	6	12.557.750	25,00	22,43	Bid. Anggaran
	Manajemen Pinjaman Daerah	Pengelolaan Pinjaman Daerah	2	Thn	227.164.800	1	155.400.000											-	-	1	155.400.000	50,00	68,41	Bid. Anggaran
	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Jumlah stiker Barang Milik Daerah BPKAD	1.500	Lbr	10.000.000	1500	10.000.000											-	-	1.500	10.000.000	100,00	100,00	Sekretariat
	Penyusunan analisis Standar Belanja (ASB)	Tersedianya Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai dasar penyusunan APBD	2	Dokumen	415.160.800	1	120.560.300											-	-	1	120.560.300	50,00	29,04	Bid. Anggaran
																		26,58	35,75					
																		SR	SR					
	Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Interkoneksi Internet dan Jaringan Intranet.	200	%	76.400.000	50	50.678.800	1	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50.678.800	25,00	66,33	Sekretariat
	Pembuatan Website	Website BPKAD	2	Unit	76.400.000	1	50.678.800	1	30.000.000									-	-	1	50.678.800	50,00	66,33	Sekretariat
	Rata-Rata Capaian Kinerja %																	-	-					
	Predikat Kinerja																		SR	SR				
	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	100	%	94.500.000	34	24.293.500	33	42.000.000	8	2.628.000							8	7.208.000	42	31.501.500	42,25	33,33	Sekretariat

IV	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPKAD	PROGRAM Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100		172.279.500	60	78.451.100	20	27.000.000	-	20	5.879.000	-	-	-	-	20	5.879.000	80	84.330.100	80,00	48,95	Sekretariat			
		Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / penyusunan Laporan Kinerja Tahunan(LKT)	Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPKAD	40	Buku	48.879.500	24	23.437.500	8	10.000.000		8	5.879.000					8	5.879.000	32	29.316.500	80,00	59,98	Sekretariat			
	Rata-Rata Capaian Kinerja %																		100	21,77							
	Predikat Kinerja																										
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	61.700.000	50	27.506.800	25	8.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	27.506.800	50,00	44,58	Sekretariat		
		Sistem informasi Perencanaan SKPD	Sistem informasi Perencanaan SKPD	1	Unit	10.200.000	1	3.268.900						0							1	3.268.900	100,00	32,05	Sekretariat		
		Penyusunan Renstra SKPD	Renstra SKPD	3	Dokumen	30.500.000	2	20.238.000						0							2	20.238.000	66,67	66,35	Sekretariat		
		Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi SKPD	Terlaksananya penyusunan data BPKAD dalam sistem informasi pembangunan monitoring dan evaluasi	15	Buku	21.000.000	5	3.999.900	5	8.500.000				0							5	3.999.900	33,33	19,05	Sekretariat		
	Rata-Rata Capaian Kinerja %											-	-														
	Predikat Kinerja																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat daerah Kabupaten berikutnya:																											

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Pada tahun 2017, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki 8 (delapan) indikator kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Secara umum, pelaksanaan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terealisasi sesuai yang ditargetkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014-2019.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kubu Raya

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	I K K	Target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ketepatan Waktu Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	-	-	-	-	Paling lambat akhir Desember (31 Desember) tahun anggaran sebelumnya	Paling lambat akhir Desember (31 Desember) tahun anggaran sebelumnya	-	-	Paling lambat akhir Desember (31 Desember) tahun anggaran sebelumnya	Paling lambat akhir Desember (31 Desember) tahun anggaran sebelumnya	
2	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)					Paling lambat 3 bln setelah tahun anggaran berakhir	Paling lambat 3 bln setelah tahun anggaran berakhir					

3	Persentase kesesuaian penyajian laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)					100%	100%					
4	Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	-	-	Paling Lambat 6 bln setelah tahun anggaran berakhir	Paling Lambat 6 bln setelah tahun anggaran berakhir	-	-	Paling Lambat 6 bln setelah tahun anggaran berakhir	Paling Lambat 6 bln setelah tahun anggaran berakhir	
5	Persentase Laporan Penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial yang disampaikan sesuai aturan	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
6	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar akuntansi Pemerintahan (SAP)	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
7	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pengelolaan Aset sesuai Standar	-	-	-	-	65%	70%	-	-	65%	70%	
8	Persentase Pencatatan Aset Tetap	-	-	-	-	60%	65%	-	-	60%	65%	

9	Nilai SAKIP	-	-	-	-	A	A	-	-	A	A	
10	Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran tepat waktu				95%				100%			
11	Jumlah SKPD dengan penyerapan keuangan sesuai target				90%				92%			
12	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu				100%				93%			
13	Opini BPK terhadap laporan keuangan (WTP)				WTP				WTP			
14	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu				100%				100%			
15	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban				6 bulan setelah tahun anggaran berakhir				6 bulan setelah tahun anggaran berakhir			

	Pelaksanaan APBD tepat waktu											
16	Persentase DPA SKPD yang sesuai dengan RKBU				90%				78%			
17	Persentase Pencatatan Aset tetap				75%				106,78%			
18	Tersedianya Rancangan peraturan daerah tentang APBD	-	-	1 Perda APBD TA 2017	-	-	-	1 Perda APBD TA 2017	-	-	-	
19	Tersedianya Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	-	-	1 Perbup Penjabaran APBD TA 2017	-	-	-	1 Perbup Penjabaran APBD TA 2017	-	-	-	
20	Tersedianya rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	-	-	1 Perda Perubahan APBD TA 2016	-	-	-	1 Perda Perubahan APBD TA 2016	-	-	-	

21	Tersediannya Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	-	-	1 Perbup Penjabaran perubahan APBD TA 2016	-	-	-	1 Perbup Penjabaran perubahan APBD TA 2016	-	-	-	
22	Tersediannya DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD	-	-	38 SKPD	-	-	-	38 SKPD	-	-	-	
23	Penerimaan dana Perimbangan (DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil)	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	
24	Jumlah Penerbitan pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	-	-	9226 SP2D	-	-	-	5602 SP2D	-	-	-	
25	Tersediannya daftar gaji PNS Kabupaten Kubu Raya	-	-	4264 Daftar Gaji/Kartu Gaji	-	-	-	5.807 Daftar Gaji/Kartu Gaji	-	-	-	
26	Tersediannya Regulasi Ketentuan Peraturan Pengelolaan Keuangan daerah	-	-	20 Juknis	-	-	-	20 Juknis	-	-	-	

27	Tersedianya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	1 Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015	-	-	-	1 Perda Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD TA 2015	-	-	-	
28	Tersedianya Perbup Penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	1 Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015	-	-	-	1 Perbup Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD TA 2015	-	-	-	
29	Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Fungsional Bendahara tepat waktu	-	-	100%	-	-	-	99.97%	-	-	-	
30	Tersedianya Laporan Keuangan Kabupaten Kubu Raya	-	-	1 laporan Keuangan KKR	-	-	-	1 laporan Keuangan KKR	-	-	-	
31	Tersedianya Standar pengadaan dan pemeliharaan Aset daerah	-	-	2 Regulasi	-	-	-	2 Regulasi	-	-	-	

32	Terinventarisirnya Aset Daerah dalam SIMBADA	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	
33	Jumlah Aset daerah yang dihapus tiap tahun	-	-	38 SKPD	-	-	-	15 SKPD	-	-	-	
34	Persentase bertambahnya aset daerah tiap tahun	-	-	2%	-	-	-	6.55%	-	-	-	
35	Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja BPKAD	-	-	4 laporan	-	-	-	4 Laporan	-	-	-	

Berdasarkan tabel tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki indikator kinerja yang berbeda untuk tahun 2015 dan 2016,2017, serta 2018 dan 2019. Perubahan Indikator Kinerja tersebut dilakukan karena perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 1 Perda APBD Tahun anggaran 2017;
2. Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 1 Perbup Penjabaran APBD Tahun anggaran 2017;
3. Tersedianya Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 1 Perda Perubahan APBD Tahun anggaran 2017;
4. Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 1 Perbup Penjabaran APBD Tahun anggaran 2017;
5. Tersedianya DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 38 SKPD;
6. Penerimaan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil). Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 100%;

7. Jumlah Penerbitan Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Indikator kinerja ini terealisasi 5.602 SP2D dari yang ditargetkan 9.226 SP2D;
8. Tersedianya Daftar Gaji PNS Kabupaten Kubu Raya. Indikator kinerja ini terealisasi 5.807 Daftar Gaji/ Kartu Gaji dari yang ditargetkan 4.264 Daftar Gaji/ Kartu Gaji;
9. Tersedianya Regulasi Ketentuan Peraturan Pengelolaan Keuangan daerah. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 20 Petunjuk Teknis ;
10. Tersedianya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 1 Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
11. Tersedianya Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 1 Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
12. Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Fungsional Bendahara tepat waktu. Indikator Kinerja kegiatan ini terealisasi 99,97% dari yang ditargetkan 100%;
13. Tersedianya Laporan Keuangan Kabupaten Kubu Raya. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 1 Laporan Keuangan Kabupaten Kubu Raya;
14. Tersedianya Standar Pengadaan dan Pemeliharaan Aset daerah. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 2 regulasi;
15. Terinventarisirnya Aset Daerah dalam SIMBADA. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 100%;
16. Jumlah Aset Daerah yang dihapus tiap tahun Indikator kinerja ini terealisasi 15 SKPD dari 38 SKPd yang ditargetkan;
17. Persentase bertambahnya aset daerah tiap tahun. Indikator kinerja ini terealisasi 6,55% dari 2% yang ditargetkan;

18. Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja BPKAD. Indikator kinerja ini terealisasi sesuai yang ditargetkan yaitu 4 Laporan.

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja “Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran tepat waktu” ditargetkan 95% dan terealisasi 100%. Tolok ukur indikator kinerja ini yaitu dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kubu Raya yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah, 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan kegiatan tepat waktu;
2. Indikator kinerja “Jumlah SKPD dengan penyerapan keuangan sesuai target” ditargetkan 90% dan terealisasi 92%. Tolok ukur indikator kinerja ini yaitu jumlah Perangkat Daerah yang realisasi penyerapan anggarannya minimal 80% dari target anggaran yang ditetapkan terhadap seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kubu Raya. Pada tahun 2017, jumlah Perangkat Daerah yang realisasi penyerapan anggarannya minimal 80% dari target anggaran yang ditetapkan yaitu 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah dari seluruh perangkat daerah yang berjumlah 36 (tiga puluh enam);
3. Indikator kinerja “Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu” ditargetkan 100% dan terealisasi 93%. Capaian indikator kinerja ini diukur dari jumlah penerbitan SP2D tepat waktu terhadap keseluruhan jumlah SP2D yang diterbitkan. Tahun 2017, jumlah penerbitan SP2D tepat waktu sebanyak 10.212 dan jumlah keseluruhan SP2D yang diterbitkan 10.980;
4. Indikator Kinerja ”Opini BPK terhadap pelaporan keuangan (WTP)” terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yaitu opini BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

5. Indikator Kinerja “Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu” ditargetkan 100% dan terealisasi 100%. Pengukuran capaian indikator kinerja ini diperoleh dari jumlah perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu terhadap jumlah seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kubu Raya. Pada tahun 2017, jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sebanyak 36 (tiga puluh enam) dari seluruh Perangkat daerah yang berjumlah 36 (tiga puluh enam).
6. Indikator Kinerja “Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu”. Pada tahun 2017, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu yaitu 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal ini berarti target yang direncanakan dapat direalisasikan.
7. Indikator kinerja “Persentase DPA SKPD yang sesuai dengan RKBU” ditargetkan 90% dan terealisasi 78%. Tolok ukur pencapaian indikator kinerja ini yaitu jumlah DPA-SKPD yang sesuai dengan RKBU. Pada tahun 2017, jumlah DPA-SKPD yang sesuai dengan RKBU sebanyak 28 (dua puluh delapan) dari seluruh jumlah DPA-SKPD sebanyak 36 (tiga puluh enam).
8. Indikator Kinerja “Persentase pencatatan aset tetap” ditargetkan 75% dan terealisasi 106,78%. Pada tahun 2017, jumlah nilai aset yang sudah tercatat Rp262.524.976.805,28 dari jumlah nilai aset tetap yang seharusnya tercatat Rp245.854.925.080,00.

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi BPKAD dan Catatan Strategis

Isu penting penyelenggaraan fungsi dan tugas BPKAD saat ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan hingga pelaporan.

Hal-hal krusial yang berhubungan dengan proses perencanaan diantaranya analisis dan proyeksi program kegiatan dan keuangan yang tepat, sesuai dengan aturan/standar serta kemampuan daerah. Akurasi proses perencanaan akan berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien. Salah satu isu penting di BPKAD pada tahun anggaran 2018 yang harus mendapat perhatian adalah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Oleh karena itu, program dan kegiatan harus diawali dengan proses perencanaan yang optimal terutama dalam penetapan target indikator kinerja utama agar sesuai dengan perkembangan dan dinamika di lapangan.

Penatausahaan sebagai proses pengelolaan administrasi keuangan dari realisasi pelaksanaan kegiatan dari waktu ke waktu senantiasa akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Pada tahun anggaran 2018, proses penatausahaan administrasi keuangan di BPKAD baik dalam kapasitasnya sebagai Perangkat Daerah maupun SKPKD ditandai dengan pemanfaatan perangkat lunak (*software*) untuk mendukung proses kerja. Berjalannya fungsi penatausahaan dengan baik diharapkan akan menghasilkan pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang *reliable* dan minim dari berbagai catatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disusun dalam format laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BPKAD mempunyai peranan strategis dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Isu penting lainnya berkaitan dengan laporan keuangan Kabupaten Kubu Raya adalah penyelesaian berbagai catatan BPK dan upaya-upaya yang

harus dilaksanakan dalam rangka penerapan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual.

Pengelolaan aset daerah (manajemen aset) juga menjadi fokus program dan kegiatan di tahun 2018. Pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan penghapusan aset akan terus diperbaiki dengan dukungan peraturan dan aplikasi *software* manajemen aset terkini.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga menjalankan fungsi perbendaharaan daerah, verifikasi, pembukuan dan pelaporan pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya. Fungsi perbendaharaan berkaitan dengan penyediaan instrument-instrumen pembayaran terhadap semua program dan kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Kubu Raya. Sinkronisasi persepsi mekanisme perbendaharaan diantara pelaksana masih menjadi tantangan tersendiri bagi BPKAD di masa datang.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD diantaranya :

- a. Sumber Daya Manusia pengelola keuangan dan aset secara kualitas dan kuantitas belum memadai;
- b. Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia pada organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Sarana dan prasarana pendukung belum memadai;
- d. Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan; dan
- e. Masih lemahnya koordinasi dan komitmen organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kubu Raya dalam membenahi permasalahan aset yang berada dalam penguasaannya.

Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

- a. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dalam rangka mewujudkan *good governance*;
- b. Meningkatnya intensitas pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi perangkat daerah termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Kesamaan pandangan dan pemahaman aparatur pengelola keuangan dan aset daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Adanya dukungan baik dari pimpinan eksekutif dan legislatif

Rekomendasi dan Catatan Strategis

- a. Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia dengan memberikan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, dan kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Sumber Daya Manusia khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Secara kuantitas, Sumber Daya Manusia dapat ditingkatkan melalui penerimaan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Peningkatan Kompetensi SDM melalui pendidikan di bidang penilaian aset dan melakukan koordinasi serta pendampingan pada perangkat daerah dalam membuat neraca untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan;
- c. Menyediakan sarana prasarana dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Meningkatkan koordinasi dan membangun komitmen aparatur dengan organisasi perangkat daerah dalam rangka perbaikan pengelolaan aset daerah.

- e. Mengupayakan penerapan “*reward and punishment*” secara proporsional; dan
- f. Menjaga hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait dan *stakeholder*.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun.

Perbandingan antara rancangan awal usulan RKPD tahun 2018 dengan hasil analisa kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Kubu Raya

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	BPKAD	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	100%	499.058.000	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	BPKAD	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	100%	627.105.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	BPKAD	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor roda empat dan roda dua	22 Unit	3.825.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	BPKAD	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor roda empat dan roda dua	22 Unit	3.825.000	
	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	BPKAD	Tersedianya petugas, peralatan dan bahan pembersih	1 Tahun	27.400.000	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	BPKAD	Tersedianya petugas, peralatan dan bahan pembersih	1 Tahun	27.400.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPKAD	Penyediaan Kebutuhan alat Tulis Kantor	1 Tahun	59.790.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPKAD	Penyediaan Kebutuhan alat Tulis Kantor	1 Tahun	59.790.000	

	Penyediaan Barang cetakan Dan Penggandaan	BPKAD	Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	32.230.000	Penyediaan Barang cetakan Dan Penggandaan	BPKAD	Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	32.230.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Tersedianya komponen listrik /penerangan bangunan kantor	1 Tahun	5.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Tersedianya komponen listrik /penerangan bangunan kantor	1 Tahun	5.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	BPKAD	Penyediaan bahan informasi/ koran	2720 Eksemplar	7.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	BPKAD	Penyediaan bahan informasi/ koran	2720 Eksemplar	8.524.000	
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	BPKAD	Penyediaan makanan dan minum rapat	1200 Kotak	39.000.000	Penyediaan Makanan Dan Minuman	BPKAD	Penyediaan makanan dan minum rapat	1200 Kotak	39.000.000	
	Rapat koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	BPKAD	koordinasi & Konsultasi ke ibu kota negara dan daerah lain	17 kali	141.400.000	Rapat koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	BPKAD	koordinasi & Konsultasi ke ibu kota negara dan daerah lain	21 kali	259.690.000	
	Rapat koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	BPKAD	koordinasi & Konsultasi dalam kabupaten/ kecamatan	10 kali	8.933.000	Rapat koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	BPKAD	koordinasi & Konsultasi dalam kabupaten/ kecamatan	15 kali	17.866.000	
	Penataan Arsip/Dokumen Pengelolaan Keuangan	BPKAD	Penataan arsip/ dokumen pengelolaan keuangan SKPD	1 Tahun	173.280.000	Penataan Arsip/Dokumen Pengelolaan Keuangan	BPKAD	Penataan arsip/ dokumen pengelolaan keuangan SKPD	1 Tahun	173.280.000	
2	PROGRAM peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	BPKAD	Persentase Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur	100%	222.188.000	PROGRAM peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	BPKAD	Persentase Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur	100%	591.894.210	

	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	4.550.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	4.550.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BPKAD	peralatan Gedung Kantor	23 unit	54.338.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BPKAD	peralatan Gedung Kantor	69 unit	279.138.000	
	Pengadaan Meubeleu	BPKAD	Tersedianya Meubeleu			Pengadaan Meubeleu	BPKAD	Tersedianya Meubeleu	8 Unit	19.755.000	
	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	BPKAD	Tersedianya Bangunan dan ruangan Gedung Arsip	1 Unit	80.000.000	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	BPKAD	Tersedianya Bangunan dan ruangan Gedung Arsip	2 Unit	160.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BPKAD	Terpeliharanya Bangunan dan ruangan Gedung Arsip			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BPKAD	Terpeliharanya Bangunan dan ruangan Gedung Arsip	1 Unit	40.151.210	
	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPKAD	Pemeliharaan Berkala Kendaraan Dinas Operasional Roda 4(empat)	1 Unit	50.300.000	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPKAD	Pemeliharaan Berkala Kendaraan Dinas Operasional Roda 4(empat)	2 Unit	50.300.000	
	Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	14.000.000	Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	14.000.000	
	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	BPKAD	Pemeliharaan berkala peralatan Gedung kantor (mesin foto kopi)	1 Tahun	4.000.000	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	BPKAD	Pemeliharaan berkala peralatan Gedung kantor (mesin foto kopi)	1 Tahun	4.000.000	

	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Komputer	BPKAD	Berfungsinya peralatan komputer dengan baik	1 Tahun	15.000.000	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Komputer	BPKAD	Berfungsinya peralatan komputer dengan baik	1 Tahun	20.000.000	
3	PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	BPKAD	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	146.850.000	PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	BPKAD	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	184.825.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundangan	BPKAD	Pengiriman peserta Bimtek	7 Orang	75.550.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundangan	BPKAD	Pengiriman peserta Bimtek	12 Orang	113.525.000	
	Penyusunan Evaluasi Jabatan BPKAD	BPKAD	Terlaksananya Evaluasi Jabatan	5 Buku	10.000.000	Penyusunan Evaluasi Jabatan BPKAD	BPKAD	Terlaksananya Evaluasi Jabatan	5 Buku	10.000.000	
	Pengelolaan Dokumen Kepegawaian	BPKAD	Pengelolaan DUK, SKP, Kenaikan Gaji Berkala, Inpassing, Cuti, Usulan Kenaikan Pangkat, daftar hadir, dankartu induk pegawai	69 PNS dan Non PNS	61.300.000	Pengelolaan Dokumen Kepegawaian	BPKAD	Pengelolaan DUK, SKP, Kenaikan Gaji Berkala, Inpassing, Cuti, Usulan Kenaikan Pangkat, daftar hadir, dankartu induk pegawai	69 PNS dan Non PNS	61.300.000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan capaian Kinerja dan Keuangan	BPKAD	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	100%	46.261.500	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan capaian Kinerja dan Keuangan	BPKAD	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	100%	46.261.500	

	Penyusunan Lapopran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPKAD	8 Buku	10.000.000	Penyusunan Lapopran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPKAD	8 Buku	10.000.000	
	Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	BPKAD	Laporan Keuangan Semesteran Tiap tahun	5 Buku	7.261.500	Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	BPKAD	Laporan Keuangan Semesteran Tiap tahun	5 Buku	7.261.500	
	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	BPKAD	laporan Keuangan akhir tahun SKPD	10 Buku	9.500.000	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	BPKAD	laporan Keuangan akhir tahun SKPD	10 Buku	9.500.000	
	Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	BPKAD	Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	8 Buku	10.000.000	Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	BPKAD	Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	8 Buku	10.000.000	
	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	BPKAD	Dokumen RKA, DPA, dan DPPA	4 Dok	9.500.000	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	BPKAD	Dokumen RKA, DPA, dan DPPA	4 Dok	9.500.000	
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	BPKAD	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	100%	3.686.768.775	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	BPKAD	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	100%	4.703.634.665	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	BPKAD	Perda APBD	320 Buku	534.236.000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	BPKAD	Perda APBD	94 Buku	706.255.700	
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Pebup APBD	140 Buku	199.525.000	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Pebup APBD	94 Buku	192.493.000	

	Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	BPKAD	Perda perubahan APBD	337 Buku	168.922.250	Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	BPKAD	Perda perubahan APBD	94 Buku	201.520.950	
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	PERBUP perubahan APBD	420 Buku	277.494.400	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	PERBUP perubahan APBD	94 Buku	221.070.000	
	Asistensi Penyusunan RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD	BPKAD	Peningkatan pemahaman SKPD dalam Penyusunan SKPD dalam penyusunan DPA, DPPA, SPD dan Anggaran Kas	36 PD	192.678.400	Asistensi Penyusunan RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD	BPKAD	Peningkatan pemahaman SKPD dalam Penyusunan SKPD dalam penyusunan DPA, DPPA, SPD dan Anggaran Kas	36 PD	210.084.400	
	Penatausahaan Keuangan Satuan kerja Pengelolaan keuangan Daerah (SKPKD)	BPKAD	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPKD	12 Dokumen	13.520.600	Penatausahaan Keuangan Satuan kerja Pengelolaan keuangan Daerah (SKPKD)	BPKAD	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPKD	12 Dokumen	45.680.100	
	Peningkatan Pengelolaan Anggaran SKPD	BPKAD	Bertambahnya pemahaman aparatur akan pengelolaan keuangan SKPD	36 PD	54.238.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan keuangan/Anggaran SKPD	BPKAD	Bertambahnya pemahaman aparatur akan pengelolaan keuangan SKPD	36 PD	59.238.000	
	Manajemen aplikasi SIMDA	BPKAD	Pelaksanaan Penataan Dokumen SKPD dalam SIMDA	1 Dokumen	41.806.000	Manajemen aplikasi SIMDA	BPKAD	Pelaksanaan Penataan Dokumen SKPD dalam SIMDA	1 Dokumen	49.806.000	

	Pembinaan Penyusunan Laporan Fungsional Bendahara SKPD	BPKAD	Terlaksananya BIMTEK bagi pengelola keuangan daerah di SKPD			Pembinaan Penyusunan Laporan Fungsional Bendahara SKPD	BPKAD	Terlaksananya BIMTEK bagi pengelola keuangan daerah di SKPD	36 PD	42.874.250	
	Penyusunan Data Dasar, Rekonsiliasi Data Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil)	BPKAD	Terlaksananya Rekonsiliasi Data dan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil)	1 Tahun	64.178.450	Penyusunan Data Dasar, Rekonsiliasi Data Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil)	BPKAD	Terlaksananya Rekonsiliasi Data dan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil)	1 Tahun	105.003.450	
	Penatausahaan Keuangan daerah	BPKAD	Penerbitan surat Perintah Penyediaan Dana Pemerintah Kab. Kubu Raya	9,226 SP2D	418.647.175	Penatausahaan Keuangan daerah	BPKAD	Penerbitan surat Perintah Penyediaan Dana Pemerintah Kab. Kubu Raya	9,226 SP2D	418.647.175	
	Rekonsiliasi Penggajian	BPKAD	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Gaji KKR dengan Kemenkeu/Bapetarum/P T. Taspem dan BPJS	2 Kali	64.806.600	Rekonsiliasi Penggajian	BPKAD	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Gaji KKR dengan Kemenkeu/Bapetarum/P T. Taspem dan BPJS	2 Kali	98.030.000	
	Penataan Administrasi Penggajian	BPKAD	Pengelolaan Administrasi Penggajian Pegawai Pemerintah Kab. Kubu Raya	14 Bln daftar gaji	245.472.800	Penataan Administrasi Penggajian	BPKAD	Pengelolaan Administrasi Penggajian Pegawai Pemerintah Kab. Kubu Raya	14 Bln daftar gaji	285.282.800	

	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap aturan Pengelolaan Keuangan Daerah	2 kali	15.037.500	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap aturan Pengelolaan Keuangan Daerah	2 kali	15.037.500	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan keuangan Daerah	BPKAD	Peraturan tentang Perbup dan Juknis Pengelolaan Keuangan Daerah	20 Juknis	53.290.700	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan keuangan Daerah	BPKAD	Peraturan tentang Perbup dan Juknis Pengelolaan Keuangan Daerah	20 Juknis	53.290.700	
	penyusunan Rancangan Perda TT. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	PERDA TT. Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD	140 Buku	130.958.300	penyusunan Rancangan Perda TT. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	PERDA TT. Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD	140 Buku	143.458.400	
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tt. Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	PERBUP tt. Penjabaran Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD	140 Buku	98.313.800	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tt. Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	PERBUP tt. Penjabaran Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD	140 Buku	115.763.800	
	Manajemen Sistem Pengelolaan keuangan berbasis Akrual	BPKAD	Persentase Peningkatan sistem Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual	100%	102.123.700	Manajemen Sistem Pengelolaan keuangan berbasis Akrual	BPKAD	Persentase Peningkatan sistem Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual	100%	140.563.600	

	Penyusunan Laporan Keuangan (LRA, LAK, LO, LPE, LP-SAL, NERACA, CaLK)	BPKAD	Laporan Keuangan Daerah (LRA, LAK, LO, LPE, LP-SAL, Neraca, CaLK)	20 Buku	121.076.300	Penyusunan Laporan Keuangan (LRA, LAK, LO, LPE, LP-SAL, NERACA, CaLK)	BPKAD	Laporan Keuangan Daerah (LRA, LAK, LO, LPE, LP-SAL, Neraca, CaLK)	20 Buku	121.076.300	
	Penyusunan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Semesteran	BPKAD	Pelaporan keuangan semesteran	48 Buku	147.532.900	Penyusunan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Semesteran	BPKAD	Pelaporan keuangan semesteran	48 Buku	195.603.400	
	Pengelolaan Surat penyediaan dana (SPD)	BPKAD	Pengelolaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	12 Bulan	27.477.000	Pengelolaan Surat penyediaan dana (SPD)	BPKAD	Pengelolaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	12 Bulan	27.477.000	
	Manajemen Pinjaman Daerah	BPKAD	Pengelolaan Pnjaman Daerah			Manajemen Pinjaman Daerah	BPKAD	Pengelolaan Pnjaman Daerah	1 Tahun	71.764.800	
	Penyusunan Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Daerah	BPKAD	Standarisasi biaya pemeliharaan barang daerah	70 Buku	23.072.000	Penyusunan Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Daerah	BPKAD	Standarisasi biaya pemeliharaan barang daerah	70 Buku	23.072.000	
	Inventari Barang daerah	BPKAD	Terlaksanya inventarisasi barang milik daerah	90 Buku	181.438.000	Inventari Barang daerah	BPKAD	Terlaksanya inventarisasi barang milik daerah	110 Buku	202.698.000	

	Rekonsiliasi laporan keuangan, aset dan Barang Persediaan	BPKAD	Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan, Aset dan Barang Persediaan	1 Kali	46.670.000	Rekonsiliasi laporan keuangan, aset dan Barang Persediaan	BPKAD	Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan, Aset dan Barang Persediaan	2 Kali	88.431.250	
	Manajemen Penatausahaan Barang Daerah	BPKAD	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah	1 Sistem	77.500.000	Manajemen Penatausahaan Barang Daerah	BPKAD	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah	1 Sistem	182.537.000	
	penilaian Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kab. Kubu Raya	BPKAD	Data nilai aset yang sudah di nilai	30 Buku	42.265.000	penilaian Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kab. Kubu Raya	BPKAD	Data nilai aset yang sudah di nilai	30 Buku	58.695.000	
	Penyusunan daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah	BPKAD	Data kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	80 Buku	34.523.000	Penyusunan daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah	BPKAD	Data kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	80 Buku	34.523.000	
	Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah kab. Kubu Raya	BPKAD	Tersedianya data nilai aset yang dihapuskan	40 Buku	60.046.000	Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah kab. Kubu Raya	BPKAD	Tersedianya data nilai aset yang dihapuskan	40 Buku	61.442.850	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Tersedianya identitas Aset Milik Pemerintah Daerah	30 Unit	77.744.900	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Tersedianya identitas Aset Milik Pemerintah Daerah	73 unit	311.290.240	

	Manajemen Aplikasi pemetaan Aset daerah	BPKAD	Terlaksananya pemetaan aset daerah berbasis geogle map	1 Aplikasi	85.944.000	Manajemen Aplikasi pemetaan Aset daerah	BPKAD	Terlaksananya pemetaan aset daerah berbasis geogle map	1 Aplikasi	149.344.000	
	Penyelesaian Kerugian Daerah	BPKAD	Terlaksananya Penyelesaian TGR Keuangan dan Barang Milik Daerah	11 PD	41.220.000	Penyelesaian TGR (Tuntutan Ganti rugi) keuangan dan Barang Milik Daerah (Kerugian daerah)	BPKAD	Terlaksananya Penyelesaian TGR Keuangan dan Barang Milik Daerah	11 PD	26.570.000	
	Penyusunan standar satuan Harga	BPKAD	Standar Satuan Harga Kabupaten Kubu Raya	90 Buku	45.010.000	Penyusunan standar satuan Harga	BPKAD	Standar Satuan Harga Kabupaten Kubu Raya	90 Buku	45.010.000	
6	Program Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan ketatalaksanaan dan aparatur daerah	BPKAD	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan aparatur Pemerintah Derah	100%	42.000.000	Program Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan ketatalaksanaan dan aparatur daerah	BPKAD	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan aparatur Pemerintah Derah	100%	51.500.000	
	peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	BPKAD	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik	1 Tahun	9.000.000	peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	BPKAD	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik	1 Tahun	9.000.000	

	Penyusunan Data Base E Formasi	BPKAD	Penyusunan database kebutuhan pegawai, menentukan kelas jabatan dan menentukan sasaran kerja pegawai	6 Buku	8.000.000	Penyusunan Data Base E Formasi	BPKAD	Penyusunan database kebutuhan pegawai, menentukan kelas jabatan dan menentukan sasaran kerja pegawai	6 Buku	8.000.000	
	penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	BPKAD	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	6 Buku	7.000.000	penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	BPKAD	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	6 Buku	7.000.000	
	Penyusunan Survei kepuasan Masyarakat	BPKAD	Terlaksana penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	6 Buku	9.000.000	Penyusunan Survei kepuasan Masyarakat	BPKAD	Terlaksana penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	6 Buku	9.000.000	
	Penyusunan Standar Pelayanan	BPKAD	Terlaksananya standar pelayanan BPKAD	4 Buku	9.000.000	Penyusunan Standar Pelayanan	BPKAD	Terlaksananya standar pelayanan BPKAD	4 Buku	9.000.000	
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) SKPD	BPKAD	Terlaksananya Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) SKPD			Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) SKPD	BPKAD	Terlaksananya Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) SKPD	6 Buku	9.500.000	
7	Program perencanaan Pembangunan Daerah	BPKAD	Persentase Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	100%	8.500.000	Program perencanaan Pembangunan Daerah	BPKAD	Persentase Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	100%	8.500.000	

	penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan evaluasi SKPD	BPKAD	Terlaksana penyusunan data BPKAD dalam sistem informasi pembangunan monitoring dan evaluasi	5 Buku	8.500.000	penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan evaluasi SKPD	BPKAD	Terlaksana penyusunan data BPKAD dalam sistem informasi pembangunan monitoring dan evaluasi	5 Buku	8.500.000	
8	Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi	BPKAD	Persentase Interkoneksi Internet dan Jaringan Intranet	100%	0		BPKAD	Persentase Interkoneksi Internet dan Jaringan Intranet	100%	25.000.000	
	Pembuatan Website	BPKAD	Website BPKAD			Pembuatan Website	BPKAD	Website BPKAD	1 Unit	25.000.000	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan awal Rencana Kerja dan pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018 yaitu terdiri dari 7 (tujuh) Program dan 62 (enam puluh dua) Kegiatan dengan dana Rp4.651.626.275,00. Berdasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan II serta hasil analisa kebutuhan pelaksanaan Program dan kegiatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu melakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018.

Pada Tahun 2018, Rencana Kerja mengalami perubahan dalam bentuk pergeseran dan penambahan/ pengurangan pendanaan dan indikator kinerja, serta penambahan Program dan Kegiatan. Rencana Kerja dan Pendanaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Rencana Perubahan Tahun 2018						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
I														
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang														
4	04	01	01	01		Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	BPKAD	100%	499.058.000	APBD		100%	627.105.000
4	04	01	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor roda empat dan roda dua	BPKAD	22 Unit	3.825.000	APBD		23 Unit	3.825.000
4	04	01	01	01	08	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Tersedianya petugas, peralatan dan bahan pembersih	BPKAD	1 Tahun	27.400.000	APBD		1 Tahun	27.400.000
4	04	01	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Kebutuhan alat Tulis Kantor	BPKAD	1 Tahun	59.790.000	APBD		1 Tahun	59.790.000

4	04	01	01	01	11	Penyediaan Barang cetakan Dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	1 Tahun	32.230.000	APBD		1 Tahun	32.230.000
4	04	01	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik /penerangan bangunan kantor	BPKAD	1 Tahun	5.500.000	APBD		1 Tahun	5.500.000
4	04	01	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Penyediaan bahan informasi/ koran	BPKAD	2720 Eksemplar	7.700.000	APBD		2720 Eksemplar	8.524.000
4	04	01	01	01	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Penyediaan makanan dan minum rapat	BPKAD	1200 Kotak	39.000.000	APBD		1200 Kotak	39.000.000
4	04	01	01	01	18	Rapat koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	koordinasi & Konsultasi ke ibu kota negara dan daerah lain	BPKAD	17 kali	141.400.000	APBD		21 kali	259.690.000
4	04	01	01	01	19	Rapat koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	koordinasi & Konsultasi dalam kabupaten/ kecamatan	BPKAD	10 kali	8.933.000	APBD		15 kali	17.866.000
4	04	01	01	01	25	Penataan Arsip/Dokumen Pengelolaan Keuangan	Penataan arsip/ dokumen pengelolaan keuangan SKPD	BPKAD	1 Tahun	173.280.000	APBD		1 Tahun	173.280.000
4	04	01	01	02		PROGRAM peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur	BPKAD	100%	222.188.000	APBD		100%	592.594.210

4	04	01	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	1 Unit	4.550.000	APBD		1 Unit	4.550.000
4	04	01	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	peralatan Gedung Kantor	BPKAD	23 unit	54.338.000	APBD		56 unit	279.838.000
5	04	01	01	02	10	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya Meubeleur	BPKAD			APBD		8 Unit	19.755.000
4	04	01	01	02	12	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Tersedianya Bangunan dan ruangan Gedung Arsip	BPKAD	2 Unit	80.000.000	APBD		2 Unit	160.000.000
5	04	01	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan gudang dokumen	BPKAD					1 Tahun	40.151.210
4	04	01	01	02	24	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Berkala Kendaraan Dinas Operasional Roda 4(empat)	BPKAD	1 Unit	50.300.000	APBD		2 Unit	50.300.000
4	04	01	01	02	26	Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	1 Tahun	14.000.000	APBD		1 Tahun	14.000.000
4	04	01	01	02	28	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan berkala peralatan Gedung kantor (mesin foto kopi)	BPKAD	1 Tahun	4.000.000	APBD		1 Tahun	4.000.000

4	04	01	01	02	30	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Komputer	Berfungsinya peralatan komputer dengan baik	BPKAD	1 Tahun	15.000.000	APBD		1 Tahun	20.000.000
4	04	01	01	02		Pemeliharaan Website	Berfungsinya Website BPKAD Kab. Kubu Raya				APBD		1 Unit	
4	04	01	01	05		PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BPKAD	100%	146.850.000	APBD		100%	184.825.000
4	04	01	01	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundangan	Pengiriman peserta Bimtek	BPKAD	7 Orang	75.550.000	APBD		12 Orang	113.525.000
4	04	01	01	05	07	Penyusunan Evaluasi Jabatan BPKAD	Terlaksananya Evaluasi Jabatan	BPKAD	5 Buku	10.000.000	APBD			10.000.000
5	04	01	01	05	27	Pengelolaan Dokumen Kepegawaian	Pengelolaan DUK, SKP, Kenaikan Gaji Berkala, Inpassing, Cuti, Usulan Kenaikan Pangkat, daftar hadir, dankartu induk pegawai	BPKAD	69 PNS dan Non PNS	61.300.000	APBD		69 PNS dan Non PNS	61.300.000

4	04	01	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	BPKAD	100%	46.261.500	APBD		100%	46.261.500
4	04	01	01	06	01	Penyusunan Lapopran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPKAD	BPKAD	8 Buku	10.000.000	APBD		8 Buku	10.000.000
4	04	01	01	06	02	Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran Tiap tahun	BPKAD	5 Buku	7.261.500	APBD		5 Buku	7.261.500
4	04	01	01	06	04	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	laporan Keuangan akhir tahun SKPD	BPKAD	10 Buku	9.500.000	APBD		10 Buku	9.500.000
4	04	01	01	06	12	Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah / LPPD	Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	BPKAD	8 Buku	10.000.000	APBD			10.000.000
4	04	01	01	06	08	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Dokumen RKA, DPA, dan DPPA	BPKAD	4 Dok	9.500.000	APBD		4 Dok	9.500.000
4	04	01	01	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	BPKAD	100%	3.686.768.775	APBD		100%	4.662.221.565

4	04	01	01	17	06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Perda APBD	BPKAD	320 Buku	534.236.000	APBD		320 Buku	601.011.000
4	04	01	01	17	07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Pebup APBD	BPKAD	140 Buku	199.525.000	APBD		140 Buku	241.275.000
4	04	01	01	17	08	Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Perda perubahan APBD	BPKAD	337 Buku	168.922.250	APBD		300 Buku	196.197.250
4	04	01	01	17	09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	PERBUP perubahan APBD	BPKAD	420 Buku	277.494.400	420 Buku		1 Dokumen	304.767.400
4	04	01	01	17	68	Asistensi Penyusunan RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD	Peningkatan pemahaman SKPD dalam Penyusunan SKPD dalam penyusunan DPA, DPPA, SPD dan Anggaran Kas	BPKAD	36 PD	192.678.400	APBD		36 PD	196.173.400
4	04	01	01	17	53	Penatausahaan Keuangan Satuan kerja Pengelolaan keuangan Daerah (SKPKD)	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPKD	BPKAD	12 Dok	13.520.600	APBD		12 Dok	48.680.100

4	04	01	01	17	144	Peningkatan Pengelolaan Anggaran	Bertambahnya pemahaman aparatur akan pengelolaan keuangan SKPD	BPKAD	36 PD	54.238.000	APBD		36 PD	59.238.000
4	04	01	01	17	118	Manajemen aplikasi SIMDA	Pelaksanaan Penataan Dokumen SKPD dalam SIMDA	BPKAD	1 Dokumen	41.806.000	APBD		1 Dokumen	41.806.000
4	04	01	01	17	79	Penyusunan Data Dasar, Rekonsiliasi Data Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil)	Terlaksananya Rekonsiliasi Data dan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil)	BPKAD	1 Tahun	64.178.450	APBD		1 Tahun	105.003.450
4	04	01	01	17	24	Penatausahaan Keuangan daerah	Penerbitan surat Perintah Penyediaan Dana Pemerintah Kab. Kubu Raya	BPKAD	9226 SP2D	418.647.175	APBD		9226 SP2D	418.647.175
4	04	01	01	17	137	Rekonsiliasi Penggajian	Terlaksanya Rekonsiliasi Data Gaji KKR dengan Kemenkeu/Bapetarum/PT. Taspen dan BPJS	BPKAD	2 Kali	64.806.600	APBD		3 Kali	98.030.000
4	04	01	01	17	23	Penataan Administrasi Penggajian	Pengelolaan Administrasi Penggajian Pegawai Pemerintah Kab. Kubu Raya	BPKAD	14 Bln Daftar Gaji	245.472.800	APBD		14 Bln Daftar Gaji	285.282.800

4	04	01	01	17	14	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap aturan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	2 kali	15.037.500	APBD		4 kali	15.037.500
4	04	01	01	17	04	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan keuangan Daerah	Peraturan tentang Perbup dan Juknis Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	20 Juknis	53.290.700	APBD		20 Juknis	53.290.700
4	04	01	01	17	10	penyusunan Rancangan Perda TT. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	PERDA TT. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	140 Buku	130.958.300	APBD		140 Buku	143.458.400
4	04	01	01	17	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tt. Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	PERBUP tt. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	140 Buku	98.313.800	APBD		140 Buku	115.763.800
4	04	01	01	17	76	Manajemen Sistem Pengelolaan keuangan berbasis Akrua	Persentase Peningkatan sistem Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrua	BPKAD	100%	102.123.700	APBD		100%	141.088.600

5	04	01	01	17	119	Pembinaan penyusunan laporan fungsional bendahara SKPD	laporan fungsional bendahara SKPD sesuai ketentuan	BPKAD						36 PD	42.874.250
6	04	01	01	17	120	Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)								1 Dokumen	
4	04	01	01	17	28	Penyusunan Laporan Keuangan (LRA, LAK, LO, LPE, LP-SAL, NERACA, CaLK)	Laporan Keuangan Daerah (LRA, LAK, LO, LPE, LP-SAL, Neraca, CaLK)	BPKAD	20 Buku	121.076.300	APBD			20 Buku	121.076.300
4	04	01	01	17	141	Penyusunan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Semesteran	Pelaporan keuangan semesteran	BPKAD	48 Buku	147.532.900	APBD			48 Buku	195.603.400
4	04	01	01	17	29	Pembinaan Akuntansi SKPD Berbasis Akrua	Peningkatan pemahaman SKPD dalam Akuntansi berbasis akrua (PP.71)								
3	04	01	01	17	146	Manajemen Pinjaman Daerah	Pengelolaan Pnjaman Daerah	BPKAD						1 Tahun	71.764.800
4	04	01	01	17	147	Pengelolaan Surat penyediaan dana (SPD)	Pengelolaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	BPKAD	12 Bulan	27.477.000	APBD			12 Bulan	27.477.000

4	04	01	01	17	91	Penyusunan Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Daerah	Standardisasi biaya pemeliharaan barang daerah	BPKAD	70 Buku	23.072.000	APBD		70 Buku	23.072.000
4	04	01	01	17	49	Inventarisasi Barang daerah	Terlaksana inventarisasi barang milik daerah	BPKAD	90 Buku	181.438.000	APBD		50 Buku	199.643.000
4	04	01	01	17	55	Rekonsiliasi laporan keuangan, aset dan Barang Persediaan	Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan, Aset dan Barang Persediaan	BPKAD	1 Kali	46.670.000	APBD		1 Kali	46.670.000
4	04	01	01	17	16	Manajemen Penatausahaan Barang Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah	BPKAD	1 Sistem	77.500.000	APBD		1 Sistem	182.537.000
4	04	01	01	17		Sensus Barang Milik Daerah	Informasi dan Data Barang Milik Daerah				APBD		1 Dokumen	
4	04	01	01	17	50	penilaian Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kab. Kubu Raya	Data nilai aset yang sudah di nilai	BPKAD	30 Buku	42.265.000	APBD		30 Buku	42.265.000
4	04	01	01	17	51	Penyusunan daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah	Data kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	BPKAD	80 Buku	34.523.000	APBD		80 Buku	34.523.000

4	04	01	01	17	74	Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah kab. Kubu Raya	Tersedianya data nilai aset yang dihapuskan	BPKAD	40 Buku	60.046.000	APBD		40 Buku	60.046.000
4	04	01	01	17	92	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya identitas Aset Milik Pemerintah Daerah	BPKAD	30 Unit	77.744.900	APBD		89 Unit	311.290.240
5	04	01	01	17	92	Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset daerah	Meningkatnya kemampuan manajemen pengurus dan penyimpan barang	BPKAD					100 Orang	
4	04	01	01	17	148	Manajemen Aplikasi pemetaan Aset daerah	Terlaksananya pemetaan aset daerah berbasis geogle map	BPKAD	1 Aplikasi	85.944.000	APBD		1 Aplikasi	152.399.000
4	04	01	01	17	140	Penyelesaian Kerugian Daerah	Terlaksananya Penyelesaian TGR Keuangan dan Barang Milik Daerah	BPKAD	11 PD	41.220.000	APBD		11 PD	41.220.000
4	04	01	01	17	02	Penyusunan standar satuan Harga	Standar Satuan Harga Kabupaten Kubu Raya	BPKAD	90 Buku	45.010.000	APBD		90 Buku	45.010.000

4	04	01	01	33		Program Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan ketatalaksanaan dan aparatur daerah	Terlaksananya Pelayanan Publik	BPKAD	100%	42.000.000	APBD		100%	51.500.000
4	04	01	01	33	29	peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik	BPKAD	1 Tahun	9.000.000	APBD		1 Tahun	9.000.000
4	04	01	01	33	26	Penyusunan Data Base E Formasi	Penyusunan database kebutuhan pegawai, menentukan kelas jabatan dan menentukan sasaran kerja pegawai	BPKAD	6 Buku	8.000.000	APBD			8.000.000
4	04	01	01	33	27	penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	BPKAD	6 Buku	7.000.000	APBD			7.000.000
4	04	01	01	33	32	Penyusunan Survei kepuasan Masyarakat	Terlaksanya penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	BPKAD	6 Buku	9.000.000	APBD		6 Buku	9.000.000
4	04	01	01	33	33	Penyusunan Standar Pelayanan	Terlaksananya standar pelayanan BPKAD	BPKAD	4 Buku	9.000.000	APBD			9.000.000

5	04	01	01	33	36	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) SKPD	Terlaksananya Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) SKPD	BPKAD							9.500.000
4	04	01	01	21		Program perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah	BPKAD	100%	8.500.000	APBD		100%		8.500.000
4	04	01	01	21	44	Penyusunan Renstra SKPD	Renstra SKPD	BPKAD			APBD		1 Dokumen		
4	04	01	01	21	80	penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan evaluasi SKPD	Terlaksanya penyusunan data BPKAD dalam sistem informasi pembangunan monitoring dan evaluasi	BPKAD	5 Buku	8.500.000	APBD		5 Buku		8.500.000
4	04	01	01	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tersedianya Informasi melalui Teknologi Informasi	BPKAD		0	APBD		100%		25.000.000
4	04	01	01	23	06	Pembuatan Website	Website BPKAD				APBD				25.000.000

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja setelah pelaksanaan evaluasi semester II pada tahun berjalan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta tujuan dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini disusun dalam upaya pencapaian target kinerja tahun 2018. Perubahan yang terjadi dalam program dan kegiatan tahun 2018 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi kinerja dan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Harapan yang hendak diraih dari penyusunan Renja Perubahan ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan satuan kerja pemerintah daerah semakin meningkat dan berkualitas. Renja Perubahan juga diharapkan mampu mengantisipasi tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya di waktu yang akan datang.